Tim Penulis:
Mahyuddin, Muhammad Rusdi, Ilham, Masna,
Nugrahayu, Nur Nadiya Rahma,
A. Jurana Anggriana, Silmi Qurota Ayun, Fitriani, Nuraslina.

AGAMA DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Pilar-pilar Membangun Kebersamaan dalam Perbedaan

AGAMA DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Pilar-pilar Membangun Kebersamaan dalam Perbedaan

AGAMA DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Pilar-pilar Membangun Kebersamaan dalam Perbedaan

Tim Penulis : Mahyuddin, Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib, Ilham, Masna, Nugrahayu, Nur Nadiya Rahma, A. Jurana Anggriana, Silmi Qurota Ayun Ariadian, Fitriani, Nuraslina.

Editor : Wahyuddin Bakri

Cover : Fitrawan Umar

ISBN: 978-623-926628-8

Diterbitkan oleh:

IAIN Parepare Nusantara Press

Jalan Amal Bakti No.8 Soreang

Kota Parepare, Sulawesi Selatan

91132

Diterbitkan atas dukungan dari

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tahun 2020

EDITOR

Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas anugrah, taufiq dan hidayahNya sehingga kita semua diberikan ni'mat kesehatan dan kesempatan serta memberikan kita kemudahan di segala aktifitas yang kita lakukan. Begitu pula shalawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, atas petunjuk sehingga menjadikan manusia berada pada gemerlapnya kehidupan yang dipenuhi dengan rahmat dan pengatahuan seperti yang kita alami saat sekarang ini.

Buku ini merupakan karya civitas akademik prodi sosiologi agama FUAD IAIN Parepare, berjudul **"Agama dan Masyarakat Multikultural, *pilar-pilar membangun kebersamaan dalam perbedaan*"** secara singkat mengurai kondisi sosio-kultural khususnya pada perbedaan budaya dan agama di Indonesia, upaya membangun kebersamaan dalam setiap perbedaan membutuhkan pengetahuan yang luas akan perbedaan agar tercipta kesadaran kolektif menuju integrasi multikultural.

Singkat kata bahwa sangat mengapresiasi buku ini, dengan analisis yang kongkrit dan tajam mampu mengurai eksistensi multikultural menuju integritas sosial, sekian

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Parepare, 01 Oktober 2020

Wahyuddin Bakri

Kata Pengantar Penulis

Buku yang akan Anda baca ini merupakan karya yang lahir dari tugas akhir mata kuliah "Agama dan Masyarakat Multikultural". Para penulisnya adalah mahasiswa-mahasiswi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare di mana mereka yang terseleksi tulisannya dimasukkan ke dalam buku antologi ini.

Buku ini merupakan sebuah upaya untuk mengkaji fenomena dan dinamika masyarakat yang beragam ditilik dari sisi perbedaan agama dan budaya. Persoalan di sekitar direspons berkaitan dengan reaksi masyarakat terhadap keberagaman yang masih menyisakan pekerjaan rumah bersama, yaitu masyarakat Indonesia yang multikultur termasuk plural dari segi agama dihadapkan pada fenomena benturan-benturan sosial bernuansa identitas.

Sebagai program studi yang konsen mempelajari isu-isu sosial kemasyarakatan, catatan-catatan singkat ini yang direkam dan dipotret oleh para penulis diharapkan dapat menjadi referensi-referensi tambahan dalam rangka mencari landasan-landasan sosial bagaimana mengelola kemajemukan dengan menciptakan kondisi-kondisi harmoni dalam keberbedaan. Dengan harapan itu, kami berharap narasi yang dikembangkan dalam buku ini dapat berkontribusi membangun diskursus sosial kaitannya

dengan mengupayakan transformasi masyarakat dalam mengelola keragaman dengan lebih baik.

Disadari dengan sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca. Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai pengisi diskursus-diskursus dalam memahami dinamika agama dan kebudayaan masyarakat secara khusus di Indonesia. Atas ekspektasi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Parepare, 16 Juli 2020

Tim Penulis

DAFTAR ISI

MENEGUHKAN KEBERSAMAAN DALAM PERBEDAAN

Mahyuddin

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling beragam secara multikultural. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua bentuk mainstream. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan perbedaan agama, adat istiadat serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2012).

Kenyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari gambaran tentang perbedaan yang sedang kita alami dalam masyarakat memang memiliki perbedaan-perbedaan signifikan. Suka atau tidak suka, kita demikian menyadari bahwa selain jumlah tersebut dapat menjadi potensi dan modal bersama dalam membangun peradaban bangsa, namun juga tidak dinafikan bahwa besarnya jumlah penduduk dengan segala kemajemukan di dalamnya dapat menjadi penghalang bagi tercapainya cita-cita hidup bangsa. Semua itu dapat menjadi potensi kuat apabila dikelola secara baik dalam perikehidupan. Sebaliknya, ia akan menjadi ancaman apabila tidak disikapi dengan bijaksana segala perbedaan-perbedaan yang ada.

Pada level praktis, misalnya, identitas suku, budaya, agama dan tradisi ritual memengaruhi perilaku sesorang atau kelompoknya. Identitas-identitas tersebut tidak hanya memengaruhi pikiran perasaan seseorang, tetapi juga menentukan perilaku dalam menghadapi situasi sosial di lingkungannya. Sebagaimana dikemukakan oleh T. LaFrombise, H.L.K. Coleman, dan J. Gerton dalam (Liliweri, 2009), bahwa model-model hubungan dua kultur, seperti asimilasi antarbudaya, akulturasi dan alterasi tetap tidak bisa dilepaskan dari identitas diri mereka. Tatkala seseorang atau kelompok mulai menerapkan kesadaran multikultural, hal ini sangat tergantung pada derajat kontak, loyalitas, dan keterlibatan individu dalam budaya lama/asli dengan budaya baru. Kemampuan untuk menjaga kerukunan dan terampil meredam serta menyelesaikan berbagai ketegangan yang menghinggapinya sangat ditentukan oleh pikiran-pikiran bersama masyarakat yang merupakan hasil internalisasi dari nilai dan norma yang bersumber dari budaya dan agama. Sehingga, kunci dari kemampuan membangun kesadaran multikultur terletak pada sejauhmana komitmen menciptakan imajinasi-imajinasi kolektif. Dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan kelompok-kelompok mengakui pengalaman sejarah dan kebudayaan bersama.

Pernyataan ini menunjukkan lahirnya keragaman masyarakat yang kelompoknya mampu membentuk simpul dan simbol pemersatu yang menjadi nilai bersama, terbentuk karena ada kemauan bersama merawat

keragaman. Ya, masyarakat kita sangat kental dengan nilai budayanya yang sangat menjunjung cita-cita hidup rukun-damai dan mengakui adanya keanekaraman. Dalam mengarungi kehidupan bersama mencapai kesatupaduan, kita demikian membutuhkan simpul-simpul kebersamaan, oleh Hasse Jubba disebutnya "kecerdasan lokal". Bahwa setiap daerah/etnis di nusantara memiliki "kecerdasan lokal" yang turut berperan meneguhkan keragaman masyarakat dalam persaudaraan kebangsaan Indonesia.

Dibawah Bayang-bayang Ketegangan Sosial

Dalam kehidupan sosial yang dinamis, keragaman bukanlah benda mati yang stagnan. Ia hidup dan dinamis mengikuti perkembangan yang ada sesuai konteks zaman. Realitas bangsa Indonesia yang beragam ini memang tidak dimungkiri menyimpan potensi kuat munculnya berbagai permasalahan sosial bernuansa identitas di lingkup kehidupan sosial masyarakat. Belum luput dari ingatan tentang peristiwa konflik-konflik bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang meledak dan merebak di awal-awal reformasi seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Peristiwa sosial tersebut adalah sederetan wilayah konflik sosial berskala cukup besar yang beririsan dengan perbedaan etnis dan agama.

Inilah konsekuensi masyarakat majemuk. Bahwa di dalam struktur yang beragam, hampir dapat dipastikan akan diliputi benih-benih konflik yang lazim disebut konflik

laten. Ia terjadi bisa saja karena perbedaan kebiasaan (tradisi budaya), cara pandang (baik ideologi maupun politik), termasuk perselisihan keyakinan (agama). Di dalam kehidupan sosial mereka, terjadi benturan-benturan kepentingan yang kadang kala berujung pada kekerasan fisik.

Namun, ada secercah harapan tatkala bangsa ini mulai bisa menghentikan konflik horizontal tersebut. Pihak-pihak yang selama ini bertikai, menyepakati proses-proses pengintegrasian demi mencapai titik keseimbangan dan kehidupan sosial yang lebih harmoni. Secara perlahan tali-tali pengikat kebersamaan kini kembali kokoh setelah semua pihak kembali sadar bahwa tensi sosial (konflik) sudah seharusnya ditanggalkan. Antarelemen yang tengah berkonflik saat itu menyadari sepenuhnya bahwa perlu mengendalikan diri atau mengeliminasi segala potensi konflik jika bangsa ini ingin bertahan pada kokohnya fondasi persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi bangsa ini tidak terancam. Karena itu kita melihat adanya reintegrasi sosial masyarakat menuju kerukunan sosial bersama.

Akan tetapi, semakin ke sini semakin nyata bahwa gesekan perbedaan tersebut kembali meletup-letup setiap saat. Tidak jarang kita menemukan disharmoni sosial lantaran hubungan kelompok-kelompok masyarakat, tidak akomodatif terhadap perbedaan latar belakang identitas. Parahnya, ada kecenderungan memaksakan kehendak dan dengan gampangnya mempersekusi kelompok lain.

Keragaman etnis dan agama misalnya, berbagai kejadian di beberapa wilayah bahkan nasional memang memprihatinkan sebab fenomena tersebut mulai menggerus prospek kebersamaan kita. Tidak bisa dipungkiri sektarianisme kian menguat belakangan ini. Itu dengan mudah dapat kita temukan pada kasus-kasus pemilihan kepala daerah.

Yulizar Syafri dalam bukunya *Kontekstualisasi Kesukubangsaan di Perkotaan* menyebutkan bahwa ada proses sosial yang kini berkembang dalam hubungan antarsuku bangsa terutama di perkotaan. Dengan mengambil studi kasus di kota Batam, ia mengidentifikasi pola perubahan bekerjanya fenomena kesukubangsaan di masyarakat perkotaan. Menurutnya, penciptaan batas-batas sosial yang sedikit banyak dipengaruhi oleh konstruksi identitas suku sebagai penilaian sosial yang dijadikan pedoman untuk mengkategorisasikan keanggotaan suku bangsanya, membawa konsekuensi pada pergeseran batas sosial suku bangsa di mana penilaian sosial individu dan kelompok dalam lingkungan interaksi sosialnya tergantung dari konteks sosial dan strategi pencapaian tujuan yang ingin didapatkan pelaku yang ikut serta dalam interaksi tersebut (Syafri, 2010).

Dalam penemuan ini, dapat dipahami bahwa atribut kesukubangsaan acapkali digunakan sebagai kekuatan sosial dalam rangka memperebutkan sumber ekonomi dan politik di perkotaan. Arena politik dan ekonomi merupakan bagian dari lingkungan sosial yang menjadi wadah bagi pelaku-

pelaku mengorganisir dirinya dalam kelembagaan atau organisasi tertentu. Dampak sosialnya yang kemudian muncul adalah sudah mulai tumbuh perpecahan-perpecahan atas nama suku bangsa yang kadang kala menguat dan berkembang terutama di musim-musim pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Studi yang dilakukan oleh Sri Astuti Buchari menunjukkan bahwa saat ini hampir di setiap daerah politik identis etnis kian menguat. Ikatan emosional etnis semakin erat dan kuat, karena adanya *common cause, common goal, and common interest* dan pada akhirnya memunculkan politik identitas, yang merupakan aliran politik dengan melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik seperti agama, etnis dan budaya (Buchari, 2014). Dari sini tercipta bentuk konflik baru di masyarakat akibat identitas menjadi kontestatif. Dan jika dibiarkan berlarut-larut maka hal ini justeru membuka pandora potensi konflik berkepanjangan di masyarakat.

Di sisi lain, tidak terbantah lagi bahwa persoalan keagamaan di negeri ini juga masih menjadi diskursus penting yang tidak kalah dikhawatirkan. Di lini kehidupan masyarakat kita, ketegangan sosial bernuansa agama atau perbedaan keyakinan kadang kala masih menjadi ancaman nyata yang memantik hubungan yang tidak kondusif di kalangan (pemeluk) agama-agama khususnya antara Muslim dan non-Muslim. Pada berbagai tempat di nusantara menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan Kristen masih bersifat "kontestatif" (Jubba, 2019). Ini masih sering

mengemuka dalam banyak kondisi yang menggerus kerukunan dalam kehidupan bersama.

Menurut Jubba, pada daerah-daerah dengan komposisi penduduk yang relatif seimbang dari aspek pemeluk agama, memang masih sangat sulit ditemukan peristiwa semacam ini tetapi pada daerah-daerah yang pemeluknya ada dikotomi mayoritas-minoritas pemeluk agama, hal ini sering kali muncul. Jubba menemukan fenomena ini pada kasus Islam dan Kristen di Jayapura bahwa ada isyarat persaingan agama dengan mudah dapat dilihat. Baginya, baik masjid maupun gereja, masing-masing menonjolkan kelasnya sebagai tempat pemersatu umat dan simbol eksistensi sebuah komunitas agama.

Belum lagi bicara soal aksi vigilantisme, yakni tindakan main hakim sendiri oleh kelompok massa berdasarkan pada penilaian mereka terhadap apa yang salah dan benar (Ahnaf & Salim, 2017). Kelompok milisi sipil terkadang melakukan kekerasan (fisik, simbol dan verbal) dengan dalih membantu penegakan hukum. Berbagai kasus bernuansa kriminalitas dan intoleransi dapat dengan mudah kita saksikan seperti penolakan pendirian rumah ibadah, penyerangan kelompok minoritas (baik Islam maupun kristen dan agama lainnya) serta peristiwa penghakiman-penghakiman lainnya yang semuanya dapat dilacak di berbagai media. Tidak jarangan kita menemukan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya saling "meniadakan" bahkan terlibat dalam pandangan yang mendudukkan "kelompok lain" sebagai ancaman (Abdullah

dalam Jubba, 2019). Intinya, ada kecenderungan menguatnya identitas, kebencian serta antagonisme bernuansa etnisitas dan sentimen keagamaan.

Fonomena-fenomena ini yang memantik ketegangan sosial dalam lini kehidupan masyarakat. Ekpresi-ekspresi kekerasan dan intoleransi sampai saat ini masih sering menghinggapi masyarakat kita. Konflik etnisitas hingga konflik Pilkada bernuansa hubungan antaragama adalah isu krusial yang menjadi bulan-bulanan dihadapi bangsa ini, yang tidak bisa lagi dibaca dan dipahami sebatas hal lumrah dalam politik karena ia seolah menjadikan perbedaan sebagai alat untuk meniadakan peran dan fungsi kelompok masing-masing.

Peristiwa yang cukup telanjang di ranah ini bisa kita amati pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta. Dinamika politik lokal di ibukota cukup menggerus ikatan-ikatan sosial dan nafas kebersamaan masyarakat dalam perbedaan terutama perbedaan pilihan politik. Ini lantaran representasi perilaku masyarakat di ruang publik dan berbagai media sosial tidak saja diliputi wajah kekerasan yang bersinggungan dengan agama, terutama kekerasan pada tingkat tanda (ucapan,tulisan,visual) dengan sifat dan konotasi-konotasi negatif, tetapi juga di dalam Pilkada tersebut, ruang-ruang publik sangat kental dengan sikap intoleransi dan kontestasi agama (Mahyuddin, 2019). Hal ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak terutama hadirnya bentuk konflik baru di kalangan kelompok etnis dan agama sebab konflik yang bersumber dari mobilisasi

politik atas nama etnik, agama, daerah/wilayah tersebut, secara potensial muncul juga di wilayah-wilayah nusantara lainnya.

Pengembangan Keharmonisan Masyarakat Multikultural

Keragaman masyarakat bangsa ini adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Ia merupakan kenyataan yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, keragaman yang di dalamnya secara pasti terendap perbedaaan-perbedaan yang memuatinya sudah semestinya tidak dianggap faktor atau pemicu pertentangan. Mengapa? Karena hal ini sudah demikian jelas duduk perkaranya bahwa kemajemukan merupakan suatu keniscayaan. Sebagaimana konflik yang senantiasa mengisi lini kehidupan sosial, perbedaan juga akan selalu mewarnai kehidupan masyarakat, yang keberadaannya tidak akan dapat dilenyapkan, sebab melenyapkan keduanya akan berarti meniadakan kehidupan sosial itu sendiri (Setiadi & Kolip, 2011).

Apa yang dibutuhkan dalam melihat fenomena ini adalah kita memerlukan pengembangan keharmonian dalam perbedaan. Semuanya itu tergantung pada bagaimana kita mengelola konflik dan keberagaman agar keberadaanya tidak menggerus kebersamaan, namun terkendali dan terarah demi terwujudnya keharmonian. Maka, kita tidak hanya dituntut mencapai keserasian, melainkan pula dibebani dengan tugas memperkokoh persatuan dan

kesatuan bangsa dalam bingkai kebhinnekaan. Disadari bahwa faktor relasional yang dapat menjadi penyebab lahirnya konflik antarkelompok kebudayaan adalah ekslusivisme etnis termasuk agama. Karenanya, sikap menutup diri dari kelompok tertentu dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama tertentu sudah seharusnya diubah menuju cita-cita damai masyarakat Indonesia yang multikultural.

Apalagi sudah menjadi pemahaman umum bersama bahwa masyarakat plural dan multikultural selain masyarakatnya tersegmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok latar belakang budaya atau subbudaya yang berbeda, juga memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang non-komplementer (Pierre L. Van de Berge dalam Nasikun, 2012. Maka kita perlu mentrasformasikan segala hal yang mengancam nafas kebersamaan kita dengan menekankan pentingnya harmoni dalam keberbedaan.

Lalu bagaimana menuju keharmonian tersebut sebagai katup penyelamat menghindarkan bangsa ini dari konflik bernuansa identitas? Saya kira ada cara yang bisa dikembangkan untuk menuju ke sana. Sepanjang ada kemauan mengembangkan sikap untuk saling menghargai (toleransi) dan keinginan meninggalkan sikap primordialisme (sikap etnosentrisme, ekstremisme dan konservatisme berlebihan), maka jalan harmoni sosial akan terbuka. Integrasi sosial akan terwujud dan masyarakat akan

terbuka menerima keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat kita.

Putrantro dalam (Hasse Jubba, 2019) membagi beberapa cara yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, yaitu (1) tidak memandang rendah suku atau budaya lain, (2) tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, (3) meneriman keragaman suku bangsa dan budaya budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, (4) lebih mengutamakan negara dari pada kepentingan daerah atu suku masing-masing, (5) memupuk toleransi di tengah-tengah keberagaman.

Dengan semangat di atas, hal ini secara langsung akan berdampak terhadap keharmonian sosial sebab di dalamnya terendap sikap kemampuan mengendalikan diri, memelihara, dan menguatkan solidaritas sosial. Hadirnya sikap penghargaan kepada orang/kelompok yang lain akan menjadi solusi damai terhadap setiap gejala konflik dalam masyarakat. Pada tataran tertentu, setiap elemen masyarakat akan memiliki rasa dan sikap sosial yang terintegrasi dalam keseimbangan.

Bahrul Hayat dalam bukunya *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* menggambarkan secara detil bagaimana keseimbangan itu terejawantahkan. Menurutnya, integrasi sosial sebagai aktualisasi sari kehidupan yang harmonis secara sosio-kultural terwujud dalam empat dimensi integrasi, yaitu (1) **integrasi budaya** ketika keharmonian mendorong interaksi terbentuknya interaksi sosial berupa

penguatan lembaga pengaturan (*body of normative elements*) untuk menata perilaku masyarakat dalam suatu sistem yang konsisten; (2) **integrasi normatif** ketika keharmonian menyebabkan terjadinya situasi yang kondusif bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan sistem norma yang ada; (3) **integrasi konsensual** yaitu dengan keharmonian akan terbangun konsensus dan kesepakatan yang efektif; dan (4) **integrasi fungsional** yaitu keharmonisan berperan mengakomodir proses sinkronisasi tuntutan dan harapan perilaku secara timbal balik antara berbagai kelompok baik budaya maupun agama.

Bila wujud-wujud di atas dapat diamati secara nyata dalam masyarakat multikultural, maka persoalan-persoalan benturan identitas akan sangat mudah dihindarkan sebab mereka tidak akan lagi menempatkan dan memaknai perbedaan sebagi sesuatu yang dipertentangkan melainkan mereka akan saling mendukung, menopang dan menenggang. Oleh Daisaku Ikeda, penulis buku "*For the Shake of Peace*" dan penerima nobel perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1983, disebutnya saling menginspirasi dan memberikan dorongan bagi orang untuk mencari kebaikan dan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan mereka.

Dari kondisi inilah akan tertanam dengan kuatnya toleransi sosial, yaitu tumbuh suatu rasa yang mencakup lebih luas dalam kehidupan bersama cara pandang yang apresiatif terhadap perbedaan. Dengan perkataan lain, masyarakat akan mewujudkan suatu filosofi penghormatan

terhadap harkat dan martabat kehidupan bersama yang akan memungkinkan mereka membangun suatu dunia yang harmonis, saling mendukung dan saling menghormati untuk kepentingan keadilan dan perdamaian, serta kesejahteraan hidup masyarakat multikultural.

Kolaborasi Membangun Sikap Moderatisme, Pluralisme dan Multikulturalisme

Prinsip-prinsip di atas merupakan kerangka ideal yang perlu dikembangkan dalam rangka mendorong terciptanya suatu masyarakat multikutural yang harmoni dan menghormati kemajemukan. Di lingkup kehidupan masyarakat luas, kita dituntut agar senantiasa menekankan gagasan pengetahuan model multikultural, bukan monokulural. Sehingga setiap elemen warga negara menyadari pentingnya inklusifitas. Di sini, kita perlu terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya rasa persaudaraan, saling bertoleransi terhadap perbedaan, saling menghormati terhadap keragaman, sebagai jalan meminimalisir masyarakat menghindari gesekan sosial yang selama ini menjadi ancaman bersama (Mahyuddin, 2020).

Di antara yang perlu dilakukan untuk sampai pada tujuan itu adalah, mengedepankan apa yang disebut dengan sikap "moderatisme" yaitu, senantiasa mencari titik keseimbangan, tidak ekstrem dan berlebih-lebihan dalam melihat perbedaan. Prinsipnya adalah bersikap adil dan berimbang dalam merespons perbedaan bernuansa identitas

yang termanifestasikan dalam serangkaian tindakan kultural berorientasi pada upaya untuk memanusiakan manusia.

Sikap demikian amatlah penting di dalam masyarakat plural sebab seseorang yang moderat akan mampu mengendalikan diri dan sanggup berempati terhadap kelompok lain dalam menyikapi perbedaan. Dengan kata lain, seseorang yang moderat akan berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan demi kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan (Tanya Jawab Moderasi Beragama, 2019).

Kemudian hal yang tidak kalah penting yang perlu terus disemaikan bersama adalah pengakuan tentang pluralisme. Pluralisme adalah sebuah pandangan posmodern yang mengatakan bahwa semua kebudayaan manusia harus dihargai dan diperhatikan. Tak ada satupun kebudayaan (atau masyarakat) pun yang superior terhadap kebudayaan atau masyarakat yang lain; bahwa setiap kebudayaan mempunyai kontribusi tertentu terhadap proses memanusiakan orang lain (Liliweri, 2009). Menurut Nurcholis Madjid, pluralisme harus dipahami sebagai "pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban" (*genuine engangement of diversities within bonds civilicity*). Bagi Nurcholis Madjid, pluralisme adalah suatu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.

Seseorang yang pluralis, memiliki pandangan bahwa peran individu atau kelompok yang beragam dalam masyarakat diberikan ruang atau pengakuan atas kesetaraan sosial dan budaya. Beragam kelompok etnik ataupun budaya dalam suatu masyarakat saling berkompromi mendorong lahirnya relasi yang seimbang antara kelompok dominan maupun minoritas. Sikap pluralisme mengandung tuntutan agar tiap-tiap individu dalam masyarakat majemuk mengambil posisi melibatkan diri secara aktif dengan mengedepankan sikap terbuka, semangat egalitarian, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sambil pada saat yang sama membangun relasi interaksi (kerukunan dan dialog) serta kerjasama (Alwi Shihab, 1999).

Pengakuan pluralisme masyarakat yang berbeda mendorong perubahan cara berpikir dari monokultur ke cara berpikir multikultur. Bukan berpikir absolutisme, yaitu mengklaim kebudayaan sendiri sebagai satu-satunya yang paling unggul sehingga menafikan keberadaan kebudayaan orang lain. Karena itu, misi utama dalam pluralisme adalah menghormati kebudayaan orang lain, tetapi juga diajak untuk selalu siap merangkul satu sama lain, menciptakan kehidupan damai serta saling mendukung.

Dalam pada itu, acuan lainnya bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikutultural ialah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun kebudayaan (Setiadi & Kolip, 2011). Untuk memotivasi orang berpandangan demikian, model

multikulturalisme ini harus ditanamkan dalam diri masyarakat terlebih lagi bagi pemangku-pemangku kepentingan.

Menurut Djohan Effendi, multikulturalisme adalah langkah lanjut dari pluralisme. Menyadari betapa kompleksnya heterogenitas atau yang mewarnai masyarakat, maka tidak cukup hanya berhenti pada pengakuan atas keberagaman sebagai suatu entitas dalam kehidupan sosial. Di sini, yang dititik beratkan bagaimana kehadiran institusi negara mendorong kerjasama antaretnik dan agama dalam semua bidang kehidupan terlebih lagi pada bidang politik (Effendi, 2010).

Multikulturalisme terejawantahkan dalam proses tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan hidup masyarakat. Maka pengarusutamaan multikulturalisme sesungguhnya penting melibatkan struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi sosial karena ia bertautan dengan doktrin tentang penyadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan, yang pada gilirannya tiap-tiap orang mempunyai kemampuan untuk mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog, kerja sama di antara beragam etnik, budaya bahkan agama.

Dengan demikian, meneguhkan kebersamaan dalam perbedaan sesungguhnya suatu pekerjaan berat, oleh karena disadari bahwa masyarakat multikultural lebih rentan terhadap gesekan sosial yang menggeser kemampuan untuk mendengarkan dan menyediakan ruang penuh pengertian dan persahabatan bagi yang lain. Oleh Alo Liliweri

disebutnya hidup di dalam masyarakat multikultur tidak menjamin interaksi sosial yang sehat karena prasangka sewaktu-waktu muncul dan berpotensi menebar aroma kecurigaan dan sentimen. Untuk itu, diperlukan sikap moderatisme, pluralisme serta multikulturalisme sebagai jawaban atas hilangnya kesunyian sosial dalam melihat perbedaan. Dengan sikap-sikap tersebut kita berharap bahwa pancaran kedamaian, kemanusiaan, keindahan dalam keragaman mampu disemaikan di setiap lini kehidupan, yang terwujud secara nyata pada hadirnya rasa hormat, penghargaan, perlindungan serta pembelaan terhadap yang lain sekalipun kita berbeda-beda.

Sebagai bangsa yang besar, baik sekarang maupun yang akan datang tentu kita sangat merindukan bahkan sangat mengharapkan tatanan masyarakat yang harmoni dan selaras satu sama lain. Untuk itu, untuk mencapai cita-cita tersebut harus dilakukan secara sadar dan terpadu dengan berkolaborasi melibatkan semua komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat serta kalangan umat beragama itu sendiri. Meminjam ungkapan Azyumardi Azra, agar ke depan menjadi lebih baik dari yang telah dihasilkan sebelumnya, tentunya hal ini memerlukan adanya kemauan (itikad) bersama untuk melakukan penataan ulang terhadap apa yang telah dan tengah terjadi dalam upaya menyusun kembali fondasi persatuan dan kesatuan bangsa.

Daftar Pustaka

Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Effendi, D. (2010). *Pluralisme dan kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei.

Hayat, B. (2013). *Mengelola kemajemukan umat beragama*. Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri.

Jubba, H. (2019). Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia. Yogyakarta: Phinisi Press.

Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKiS Pelangi Aksara.

Mahyuddin. (2019). The Crisis of Intolerance and Primordialism in the Name Of Religion in Indonesia: a Case Study Of Pilkada DKI Jakarta at 2017. *Kuriositas*, *12*(2019), 29–30.

Nasikun, J. (2012). Sistem Sosial Indonesia, cet. ketiga. *Radjawali, Jakarta.*

Setiadi, E. M., Kolip, U., & Sosiologi, P. (2011). Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

Syafri, Yulizar, (2010). Kontekstualisasi Kesukubangsaan di Perkotaan. Jakarta: Instutut Antropologi Indonesia.

PLURALISME DAN POLA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Muhammad Rusdi Talib

Menjaga kesatuan dalam beragama adalah sebuah tantangan yang besar. Betapa tidak, keragaman agama dalam kehidupan masyarakat sering kali memengaruhi harmoni beragama. Kehadiran agama tidak selamanya tampak dalam wajah harmoni sebagaimana pesan-pesan kedamaian yang diembannya. Tuhan yang mengkehendaki keragaman itu sebagai sunnatullah tidak semua manusia dimaknai sebagai suatu kenyataan-kenyataan yang harus diterima dengan lapang dada.

Permasalahan yang sering muncul di dalam masyarakat yang memiliki berbagai variasi pemeluk agama adalah sebagian kelompok agama mempertentangkan keyakinannya dengan anggota agama lain sebab berbeda pemahaman. Dengan perkataan lain, agama dalam realitas sosiologis tidak menyatu dalam realitas teologis dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat pluralis dihadapkan pada situasi ini. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya kerap kali muncul masalah yang bersinggungan dengan persoalan identitas dikarenakan perbedaan yang ada. Pada tataran ini, muncul berbagai tantangan bagi manusia yang beragama (homo religius) untuk mampu mendefiniskan situasi tersebut dalam bingkai pluralisme agama. Memetik

kata dari Budhi Munawar-Rahman memahami konsepsi berteologi dalam agama-agama yang majemuk (Malik, 2005).

Melihat kondisi yang ada bahwa setiap umat beragama belum semua mampu melihat perbedaan agama sebagai suatu sunnatullah. Tidak dimungkiri seorang pemeluk agama yang seharusnya menjunjung toleransi sosial malah saling berselisih. Sehingga, kebebasan untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan kepercayaan masing-masing tidak benar-benar bisa dijalankan secara baik dalam masyarakat. Dalam menjalankan keyakinan, misalnya, sering muncul hubungan-hubungan antarkelompok agama yang gagal mengelola keberagaman. Ini persoalan umum yang banyak muncul di berbagai negara dewasa ini. Bahwa kelompok-kelompok keyakinan sulit menghindari situasi-situasi ketegangan lantaran perbedaan keyakinan.

Menggapai Pluralisme Agama

Pluralisme agama adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan di masa-masa ini, karena pluralisme mampu menghidupkan damai dan rukun antara sesama masyarakat yang berbeda agama. Ada tiga prinsip umum dalam melihat pluralisme agama yaitu: *pertama*, pluralisme dapat dipahami dengan prinsip dalam logika yang melihat satu wujud yang banyak; *kedua* ada pengakuan bersama mengenai kualitas pengalaman agama. *Ketiga*, spritual dikenal melalui kriteria sendiri pada agama lain (Achmad, 2001).

Tentu saja bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia penting mengedepankan sikap ini yang dipenuhi beragam tantangan dalam mengelola keberagaman. Kita lihat muncul berbagai masalah keagaman yang meluas di berbagai wilayah perihal kontradiksi keagamaan. Maka sudah seharusnya kita perlu menghindari perpecahan terutama lantaran klaim-klaim agama yang merasa paling benar.

Fenomena klaim kebenaran agama para penganutnya merupakan problem sejarah sejak dahulu hingga sekarang. Perbedaan pandangan dalam melihat perbedaan keyakinan tentunya memang merupakan suatu yang tidak mampu dielakan oleh setiap manusia yang menganut kepercayaan masing-masing. Namun perlu dipahami bahwa kehidupan masyarakat modern saat ini tidak lagi hidup sendiri dalam komunitas agamanya, akan tetapi saling berdampingan dengan berbagai penganut agama yang berbeda dalam wilayah maupun negara. Jika masyarakat belum mampu dan tidak terbiasa melihat perbedaan, maka pengalaman dalam berinteraksi dengan berbagai realitas pemeluk agama lain tentu saja justru akan melahirkan problematika sosial.

Di situasi ini, gagasan tentang penghargaan terhadap kemajemukan atau disebut pula pluralisme, dapat dijadikan instrumen untuk mendengarkan dan menyediakan ruang penuh persahabatan bagi yang lain. Ini dalam rangka menjadikan umat beragama menjadi rukun dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Kita percaya bahwa dengan subur tumbuhnya pluralisme, ini akan

melahirkan suatu pandangan tentang pentingnya hidup rukun (Madjid, 1998). Kita butuh sebuah pemahaman ini yang terwujud secara nyata dalam adanya rasa hormat, penghargaan, perlindungan, terutama pembelaan terhadap yang lain yang berbeda.

Perkembangan pluralisme di Indonesia masih memiliki berbagai tantangan, salah satunya itu dengan adanya kelompok yang memahami agama secara eksklusif. Melihat keadaan itu harus ada beberapa cara atau terobosan untuk memberi pemahaman terhadap hal seperti itu kepada seluruh umat beragama terutama memberikan pemahaman terhadap penganut semua agama tentang pentingnya bersikap toleran dengan keberadaan agama lain.

Pluralisme sebagai Jalan Memaknai Kerukunan

Kemajemukan agama dan budaya pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Melihat pentingnya memanusiakan manusia atau biasa disebut humanisme, maka cita-cita univesal yang perlu terus disemai ialah menyangkut sikap-sikap sosial yang menjamin kehidupan masyarakat dapat hidup harmoni dan rukun. Setiap kita harus bersedia menghormati orang lain jika ingin dihormati. Apakah dia lelaki atau wanita, kaya atau miskin, baik atau buruk, kita tetap memerlukan penghormatan sosial.

Dalam pluralisme untuk membangun keserasian dan keharmonisan dalam hidup, diperlukan pemahaman persamaan dalam keberbedaan (Iqbal, 2014). Ini yang akan

melahirkan kesejukan hati dan ketenangan ditengah pluralitas dan keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat. Ditengah dahsyatnya ancaman perpecahan, penghormatan perbedeaan terutama persilangan agama akan membawa masyarakat mampu menengahi petikaian kelompok agama, dan hal ini merupakan kesempatan emas untuk mengawal transisi demokrasi.

Dalam konsep pluralisme agama, tatanan eksoterik dan esotorik merupakan jalan toleransi dan jalan kemanusian secara universal agama menuju kerukunan dan keterikatan pada perbedaan. Dalam konteks ini, masyarakat akan mampu membentuk keharmonian dalam memeluk agama masing-masing. Apalagi menjalin kerukunan dan saling mengenal sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an 49:13 yang dimana kita diciptakan dengan bersuku-suku dan berbangsa- bangsa agar saling mengenal. Dari ayat tersebut kita mampu memahami bahwa kita diciptakan untuk saling mengenal bukan untuk bermusuhan.

Dalam bidang sosial semua umat beragama harus mengedepankan inklusifisme dengan bersedia untuk berkerjasama agar terjalin ikatan yang kuat. Kunci untuk mencapai kerukunan beragama adalah adanya kesepakatan antar umat untuk menjaga toleransi sosial, karena kerukunan selalu berkaitan dengan toleransi. Menurut Robert Wisseberg, toleransi mengandung orintasi psikologis dan mental yang meliputi perasaan seseorang. Karena toleransi merupakan masalah hati dan pikiran, maka toleransi adalah sebuah properti individual yang akan

mampu mengembangkan sikap demokratis terutama bagaimana mengelola kemajemukan.

Para pemikir seperti Jurgen Habermas menyokong gagasan bahwa koeksistensi keragaman sosial hanya akan dapat tercapai jika semua individu dalam masyarakat dapat menyepakati sebuah sistem nilai yang didebatkan secara rasional. Jika kerangka ini dikaitkan dengan pluralisme, bahwa untuk membangun kerbersamaan, perlu sebuah dialog sebagai penopang untuk menjaga perpecahan lantaran perbedaan teologis. Dialog dilakukan dalam rangka meminimalisir perbedaan pandangan (Jubba, 2019).

Menurut Jubba, dalam konteks agama, dialog bukanlah dimaksudkan untuk menyatukan persepsi mengenai perbedaan-perbedaan karena setiap agama memiliki titik perbedaan yang mesti ditekankan sekaligus untuk membedakannya dengan agama-agama lain. Dialog dalam konteks agama adalah dialog antaragama, yaitu dialog yang dilakukan untuk membangun pertemuan hati dan pikiran antara berbagai macam agama. Ia merupakan komunikasi antar-dua orang atau lebih dalam tingkatan agamis sebagai jalan bersama menuju kebenaran. Dialog juga merupakan bentuk kerjasama dalam proyek-proyek kepentingan bersama terutama sebagai media dalam menggerakkan pesan damai agama-agama.

Jika hal seperti ini dapat dilakukan, makan hal ini akan menuntun masyarakat kepada kerukuan hidup dan membawa masyarakat kepada hidup yang tenteram, yang mampu menghantar masyarakat selain punya sikap toleransi

juga memiliki rasa menghomati, pengertian dan menghargai kesetaraan ajaran agama dan mampu bekerjasama dalam segala hal. Sehingga masyarakat mampu memahami hakikat perbedaan itu sendiri. Hubungan antar umat beragama menjadi lebih stabil. Dalam siatuasi ini, pada akhirnya akan tumbuh rasa persaudaraan, saling toleransi dalam perbedaan, menghormati keberagaman sehingga upaya untuk mewujudkan keberagaman ini mampu diterapkan agar tidak terjadi perpecahan sosial dalam masyarakat (Mahyuddin, 2019), (Mahyuddin, 2020).

Dengan demikian, pada level praksis di kalangan umat beragama, diperlukan penghormatan-penghormatan sejati dengan menata hubungan antarkelompok agama dalam bingkai pluralisme. Kita perlu merespon realitas bangsa Indonesia yang majemuk ini dengan terus berupaya meredam dan menyelesaikan berbagai ketegangan sosial bernuansa agama sebagai bagian dari upaya merawat kekayaan bangsa dan kemaslahatan hidup. Seperti yang dikatakan Heraclitus, " segala sesuatu mengalir", sesuai perkembangan zaman kita hidup akan selalu mengalami perubahan meski kita selalu mengikut perubahan bukan berarti melupakan keberagaman kita yang sangat terkenal dalam memegang kebersamaan kerukunan hidup.

Daftar Pustaka

Iqbal, M. M. (2014). Pendidikan Multikultural Interreligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia. *Sosio Didaktika*, *Vol. 1*, *No*, 89–98.

Jubba, H. (2019). Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia. Yogyakarta: Phinisi Press.

Madjid, Nurcholish. (1998). " Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), passing over: Melintas Batas Agama,(Jakarta: Gramedia pustaka utama,1998.

Malik, Thoha. Anis, (2005). Tren Pluralisme Agama: Tinjuan Kritis, Jakarta: Gema Insani Press.

Mahyuddin, M. (2019). Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12*(2), 111–122.

Mahyuddin, M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *13*(1), 103–124.

Achmad, Nur. (2001). Pluralitas Agama: Kerukunana Dalam Keragaman, Jakarta: Buku Kompas.

STIGMATISASI TERHADAP KELOMPOK AGAMA MINORITAS: BAGAIMANA KELUAR DARI KEMELUT INI?

Masna

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) stigma diartikan sebagai identitas negatif yang melekat pada diri seseorang karena beberapa faktor seperti faktor lingkungan. Sedangkan menurut kamus psikologi, stigma adalah sebuah celah pada karakter watak seseorang (Chaplin, 2000).

Erving Goffman adalah seorang ilmuan yang sering mendefinisikan stigma. Ia terkenal melalui bukunya yang berjudul Stigma: Notes on the management of a spoiled identity, yang di terbitkan pada tahun 1963. Melalui buku hasil karyanya ini Goffman mendefinisikan stigma sebagai cara ekstensip pendiskreditkan individu di mata orang lain, pencemaran, dan pengabaian seseorang (Goffman dalam Major & O'Brien, 2005).

Atribut akan stigma bukan hanya tentang karakter saja, akan tetapi juga merujuk pada fisik, status, keyakinan, gender dan orientasi seksual. Hal ini di kemukakan oleh Goffman (dalam Jalaluddin, 2011). Ia menyampaikan bahwa stigma memiliki tiga jenis yaitu karakter, fisik, dan identitas kelompok. Misalnya stigma terhadap karakter individu berupa menganggap lemah, lamban, mendominasi. Stigma terhadap fisik mengacu pada cacat fisik (tunanetra,pincang dll). Sedangkan stigma terhadap

identitas seperti ras, bangsa, dan agama. Stigma buruk terhadap kelompok-kelompok agama termasuk dalam stigma identitas kelompok (Jalaluddin, 2011).

Stigma bukanlah monster jahat, tetapi ia mampu melukai seseorang secara mendalam. Dampak stigma dapat di rasakan bertahun-tahun lamanya bisa jadi sampai seumur hidup, bahkan bisa merenggut nyawa manusia. Hadirnya stigma di penjuru belahan dunia membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, seperti politik Apartheid di Afrika Selatan, diskriminasi masyarakat kulit hitam (borjuis/proletar) di Amerika dan Eropa, diskriminasi perempuan dan berbagai diskriminasi lainnya yang lebih sadis.

Stigma dan Kelompok Minoritas Agama

Kerap kali di negara Indonesia, lensa kita menemukan stigma yang di alami oleh kelompok-kelompok minoritas religius. Beberapa kelompok agama seperti Ahmadiyah dan Syiah selama bertahun-tahun lamanya diskreditkan karena identitasnya yang berbeda dari kebanyakan umat Islam. Mereka distigmakan sesat oleh kebanyak masyarakat. Merebaknya stigma buruk terhadap kelompok tersebut memicu timbulnya para pemikir untuk menggelorakan kembali nama baik kelompok tertentu (satu aliran). Akan tetapi di pihak yang berbeda, hantaman demi hantaman, penolakan demi penolakan kerap kali di lancarkan oleh berbagai elemen masyarakat di antaranya propaganda melalui media sosial bahkan nekat melalui

ceramah publik untuk tidak memberi ruang sosial pada mereka.

Prasangka buruk pun mengemuka. Prasangka buruk terhadap kelompok minoritas ini timbul dikarenakan penilaian yang dibentuk kelompok mayoritas telah merasuk dalam memori publik. Kita saksikan, kelompok-kelompok ini di berbagai tempat hampir setiap saat mengalami kekerasan (Afdillah, 2016).

Dampak dari stigma tersebut yang mereka rasakan yaitu pengucilan sosial, sehingga kehilangan hak di berbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik, pendidikan, dan lebih parahnya kehilangan interaksi sosialnya. Karena dianggap menyimpang dan sesat, mereka terpinggirkan di ranah sosial yang lebih luas.

Inilah dampak nyata dari stigma. Ia telah menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi keharmonian sosial. Stigma melahirkan pengucilan sosial terhadap individu dapat berdampak pada menurunnya relasi sosial. Sebagai contoh misalnya terhadap penganut syiah di Indonesia, mereka sampai saat ini belum benar-benar merasakan ketentraman bersebab persekusi yang seringkali mengintai mereka. Akibanya, mereka terisolasi secara sosial.

Stigma Agama di Indonesia : Bentuk dan Dampak

Lensa sejarah Indonesia melihat bahwa sejak berabad-abad lamanya Nusantara kita sudah terisolir oleh berbagai agama resmi, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai

kepercayaan lainnya baik yang bernuansa animisme maupun dinamisme. Multiagama merupakan kekayaan Nusantara kita, penabur cita rasa dan kasih bangsa Indonesia dengan membawa sejuta harapan harmoni asmara dalam asrama Bhinneka Tuggal Ika (Berbeda-beda tetap satu tujuan) dan falsafah hidup anak bangsa(Pancasila).

Di dalam Islam terdapat empat mazhab yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh para ulama dan umat Islam,yaitu mazhab Syafii, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Keempatnya berkembang berbeda di berbagai negara dan kelompok. Mayoritas penduduk Indonesia dalam hal teologi menganut atau merujuk pada pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari, sedangkan dalam bidang fiqih berpedoman kepada madzhab Syafi'i.

Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri baik oleh kaum intelektual maupun masyarakat umum adanya perbedaan-perbedaan dalam meyakini dan mengimplementasikan ajaran Islam. Perbedaan perbedaan itu membuat penganutnya ada yang dicap sesat oleh kelompok lain. Tiga kelompok agama yang telah dianggap sesat di Indonesia adalah Ahmadiyah, Syiah, dan Gafatar.

Ahmadiyah masuk ke Indonesia atas peran 3 orang pemuda asal Sumatera: Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nurruddin, dan Zaini Dahlan yang belajar di Lahore dan Qadian. Utusan Ahmadiyah Qadian bernama Maulana Rahmat Ali bersyiar ke Indonesia pada tahun 1924 melalui santri-santri Indonesia. Penolakan terhadap Ahmadiyah sudah terjadi sejak awal. Terutama di Sumatera Barat,

Ahmadiyah tidak diterima baik oleh para ulama. Bahkan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang berisi larangan terhadap pengikutnya untuk mengikuti ajaran-ajaran Ahmadiyah (Firdaus dalam Farkhan, 2012). Pada tahun 1980 terbit fatwa MUI yang mengstigma Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyesatkan.

Kelompok lain yang mengalami masalah serupa adalah Syiah (Afdillah, 2016). Di Ternate, Syiah difatwa sesat oleh MUI setempat karena alasan sholat 3 waktu, menafsir Al- Quran tidak sesuai kaidah, dan dinilai meresahkan masyarakat. Kelompok yang berdiri sejak 2011 itu akhirnya dilarang berkegiatan untuk menghindari amuk massa (Putra, 2015). Label sesat yang diberikan oleh lembaga bentukan pemerintan justru akan mempertegas kesalahan yang dituduhkan. Dengan label sesat, massa jadi punya justifikasi untuk melakukan penyerangan. Cara yang lebih baik adalah memberi pencerahan kepada warga dan menggambarkan konsekuensi hukumnya jika melakukan penyerangan.

Syiah di Nangkrenang, Kabupaten Sampang-Madura mengalami kekerasan lebih nyata. Rumah warga dan masjid Syiah dibakar dan warga Syiah direlokasi ke Kabupaten Sidoarjo. Sampai saat ini warga Syiah Sampang tidak diperbolehkan pulang kampung. Penolakan ulama dan warga Karang Gayam dan Bluuran masih tetap tinggi. Warga Syiah seolah 'sudah haram' kembali ke kampung.Namun di lokasi relokasi, Sidoarjo, warga Syiah tidak mendapat penolakan. Respons itu disebabkan sifat

kontekstual stigma. Kelompok yang distigma ditempat A belum tentu distigma di tempat lain. Karakter masyarakat menjadi faktor sangat penting.

Dalam laporan tentang maraknya kekerasan yang dilaporkan oleh beragai sumber menyebutkan bahwa mereka yang mengalami persekusi lantaran stigma tersebut mengalami pemaksaan dan pembatasan menjalankan ritual agamanya. Mereka tidak diberi ruang untuk berkreasi. Akibatnya, mereka mengalami tekanan sosial yang amat dalam di lingkungan sosial mereka tinggal.

Apa yang Harus Dilakukan?

Di tengah kemelut bangsa dalam mengelola keberagamaan terutama perbedaan keyakian dan agama, mau tidak mau kita perlu membangun cara pandang dan pendekatan yang apresiatif dalam menghadapi kebersaman (Mahyuddin, 2019), (Mahyuddin, 2020). Karena bagaimanapun, menguatnya stigma sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan. Penilaian didasarkan pada kata orang dan berita, bukan dari sumbernya langsung. Sumber-sumber itu hanya menyampaikan keburukan kelompok yang terstigma. Kebaikan dan penderitaan mereka tidak pernah terdengar sehingga tidak memunculkan rasa empati.

Posisi agama seharusnya menjadi ruang untuk menyemai toleransi. Apalagi sebagai bangsa yang besar, sudah menjadi kewajiban kita untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sosial dan perdamaian antar umat beragama. Selain itu, negara juga perlu melakukan berbagai strategi dalam

menjamin keagamaan seseorang sebagai bagian dari hak asasi. Pada akhirnya, kita memang perlu terus menyemaikan cinta beda suku, agama, ras dan budaya sebagai salah satu usaha untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial keagamaan yang terpecah lantaran stigma sosial.

Daftar Pustaka

Afdillah, M. (2016). Dari Masjid ke Panggung Politik: Melacak Akar-akar Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang, Jawa Timur. *Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies.*

Afifuddin, A. (2014). Sejarah Masuknya Jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Chaplin,J.P.(2000). Kamus Lengkap Psikologi,Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jalaluddin. (2011). Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali.

Mahyudin. (2018). Dinamika Multikulturalisme Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Mahyuddin. (2019). The Crisis of Intolerance and Primordialism in the Name Of Religion in Indonesia: a Case Study Of Pilkada DKI Jakarta at 2017. *Kuriositas*, *12*(2019), 29–30.

Mahyuddin, M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *13*(1), 103–124.

Major, B. & O'Brien, L. T. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology, 56, 393-421.

Putra, I. E., & Pitaloka, A. (2012). Psikologi Prasangka. Bogor: Ghalia Indonesia.

MERAWAT KEBERAGAMAN MASYARAKAT DENGAN TOLERANSI SOSIAL

Nugrahayu

Indonesia memiliki keberagaman budaya serta agama yang patut dibanggakan. Dari Sabang sampai Merauke, tersebar berbagai agama dan budaya yang saling bersinggungan dalam satu dekapan kesatuan yang serasi. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai bangsa majemuk dan dikenal sebagai salah satu negara yang paling multikultural (Mahyuddin, 2018).

Terlepas di antara berbagai kelompok-kelompok keagamaan dan kebudayaan tersebut, tentu perlu megupayakan bersama agar tetap dapat hidup rukun di tengah keberagamaan. Namun, kita juga tidak menafikan bahwa potensi konflik maupun ketegangan sosial kerap mengemuka terutama beruansa agama masih kerap terjadi. Meminjam istilah Irwan Abdullah, bahwa resiko sebagai bangsa yang memiliki sifat plural dan mulitkultural, bangsa Indonesia sering disibukkan oleh urusan dinamika antarkelompok, khususnya hubungan antarpemeluk agama (Jubba, 2019).

Dalam banyak hal, kita sering menemukan ketiadaan rasa toleransi dan saling menghargai. Yang terjadi adalah hubungan di antara kelompok-kelompok sosial justru saling terlibat dalam pertikaian yang memantik kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak kondusif terutama di kalangan

antarpemeluk agama. Padahal, sebagai makhluk sosial, kita demikian memerlukan kehidupan yang harmoni dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan sebagai makhluk yang tidak bisa berlepas diri dari orang lain.

Pentingnya Merajut Toleransi Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainya. Toleransi adalah suatu proses menenggang terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam lingkup kehidupan sosial seseorang (Mahyuddin, 2019).

Pada konteks kehidupan agama, toleransi demikian diperlukan untuk menggapai kehidupan yang serasi. Sikap dan perbuatan yang tidak mengedepankan toleransi sosial, akan melahirkan tindakan diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda. Misalnya para penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat tidak mengijinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Bahkan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan keberadaan kelompok lain.

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, memang sangat diperlukan suatu sikap saling menghargai dan menghormati sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian atapun perbuatan yang sifatnya menyimpang. Mengapa

demikian? Sebab dengan sikap semacam ini masyarakat dapat menumbuhkan harmoni dalam keberagaman. Sekalipun ada banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat, tetapi perbedaan-perbedeaan itu tidak kemudian menjadikan mereka untuk tidak merajut tali kebersamaan.

Melalui toleransi diharapkan terwujud ketertiban, ketenangan dan keaktifan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing tanpa saling mengusik. Masyarakat yang berbeda tersebut dapat saling mengisi meskipun memiliki keyakinan dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Toleransi AntarMasyarakat Beragama

Toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keberagamanan dan keanekaragaman agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati oleh pihak atau golongan agama atau kepercayaan lain. Keberadaan atau eksistensi suatu golongan agama atau kepercayaan diakui dan dihormati oleh pihak-pihak kelompok beragama. Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat pada tatanan kenegaraan, tatanan kemasyarakatan maupun di hadapan tuhan yang maha esa tapi juga perbedaan-perbedaan dalam penghayatan dan peribadatannya yang sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka

menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk dan menyakini sesuai dengan hati nuraninya, maka tidak seorang pun bisa memaksakan kehendaknya atas orang lain.

Toleransi beragama sangatlah penting. Hal ini untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Masyarakat agama saat ini dihadapkan dengan berbagai problematika terutama konflik agama sebagai fenomena nyata yang tidak bisa dihindarkan. Dalam banyak hal, konflik agama justru membawa petaka sosial di kehidupan sosial secara luas. Tidak hanya memengaruhi harmoni sosial, tetapi juga merembes ke politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pada konteks ini, umat beragama harus menamukan titik persamaan, bukan mencari perbedaan yang pada akhirnya jatuh pada konflik sosial. Karena pada kenyataannya, sejarah sudah membuktikan bahwa konflik agama menjadi sangat retan, bahkan sampai menyulut pada rasa dendam oleh umat-umat sesudahnya. Inti masalah tersebut tidak saja terletak pada ketidak-kepercayaan dan adanya saling curiga, tetapi juga adanya klaim kebenaran. Masyarakat agama saling menuduh satu sama lain dan saling mengklaim kebenaran sehingga muncul intoleransi sosial. Inilah salah satu sebab terjadinya ketidakharmonisan umat beragana di Indonesia.

Perbedaan adalah hal yang tak dapat dipungkiri oleh siapapun. Maka semakin dalam perbedaan semakin dalam

pula diperlukan sikap tenggang rasa, pengendalian diri dan pengertian. Jika ada pertentangan seperti apapun itu harus memiliki kesadaran untuk selalau menjaga kesetiakawanan, toleransi dan rasa persaudaraan serta menghindari hal-hal yang bisa memicu konflik. Kelompok-kelompok agama harus bisa mengendalikan diri dari emosi yang bisa memicu permusuhan. Setiap manusia juga harus menanggalkan sikap egois, ingin menag sendiri dan menganggap dirinyalah yang selalu benar karena perbuatan tersebut menjauhkan kita dari rasa toleransi.. Setiap perbedaan ataupun kesalahpahaman yang terjadi sebisa mungkin diselesaikan secara bersama tanpa ada perasaan memihak ataupun membeda-bedakan.

Dalam rangka menciptakan kondisi yang penuh perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang beragam agama, setiap kelompok agama harus saling bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama. Eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bagi setiap masyarakat untuk masing-masing mengambil peranan penting dalam membangun perdamaian. Artinya, masing-masing tak dapat dipisah dan berjalan sendiri-sendiri karena antara masyarakat, negara dan pemerintahan serta kelompok agama saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Negara berdiri karena adanya masyarakat yang kemudian didalamnya terdapat pemerintahan yang mengaturnya (Saerozi, 2004).

Harmonisasi Umat Beragama

Agama dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari adanya fenomena-fenomena keagamaan yang muncul dalam masyarakat, baik dalam bentuk ritual, perayaan maupun simbol-simbol keagamaan, sehingga agama tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Agama yang menjelma dalam bentuk budaya inilah yang menuntut adanya dialektika sosial, sehingga agama muncul istilah misi keagamaan dalam bentuk budaya (Ritzer, 2010).

Secara sosiologis agama memiliki peran sebagai pemersatu bagi umat beragama yang sama. Menurut hendropuspito agama memiliki fungsi sebagai pemupuk persaudaraan terutama internal umat beragama. Sebab, agama juga dapat menjadi alat kontrol sosial dalam masyaraat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi mimpi buruk bagi kehidupan yang harmonis apabila tidak mampu dikelola dengan baik perbedaan-perbedaan yang ada. Di sini jalan dialog demikian diperlukan sebagai salah satu jalan menyemai kebersamaan sosial.

Dialog antar umat beragama yang terjadi dalam masyarakat tidak bisa terlepas dari sikap keberagaman kewargaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keberagaman pada dasarnya mengacu pada gagasan, masyarakat terdiri dari indentitas kelompok-

kelompok yang berbeda dapat hidup bersama khususnya dalam ikatan bersama. Dalam konteks ini, suatu Negara mempersatukan kelompok yang berbeda dengan saling menghargai dan menghormati antara umat beragama karena kebebasan beragama adalah hak setiap individu.

Kebebasan beragama di Indonesia adalah hak setiap individu selama kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Manusia yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari aktivitas berfikirnya yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dan lingkungan dimana dia berada. Tak dipungkiri dalam lingkungan sosial terdapat keberagaman. Meskipun di akui adanya perbedaan, tidak bisa kita pungkiri danya titik-titik temu yang menghubungkan keberagaman. Pemahaman keberagaman ini perlu mendapat perhatian semua pihak karena upaya membina kerukunan umat beragama sering kali terkendala oleh adanya kenyataan bahwa adanya sosialisasi ajaran keagamaan di tingkat akar rumput lebih banyak di kuasai oleh juru dakwah yang kurang peka terhadap penghargaan keberagaman budaya dan kerukunan umat beragama.

Membangun harmonisasi beragama memang hal yang mesti dilakukan oleh umat beragama dalam menyatukan serta menanamkan rasa persaudaraan juga rasa kekeluargaan walau itu berbeda keyakinan. Keragaman suku, ras, agama, di dunia khusunya Indonesia memang bukan hal yang baru kita temui, untuk itu perlu kiranya jika kerukunan umat beragama di Indonesia ini untuk saing bahu membahu. Perlu diketahui bahwa harmonisasi

bukanlah ranah untuk menyatukan kepercayaan umat beragama melainkan hanya untuk menanamkan rasa welas asih antara sesama.

Untuk memahami konsep tentang harmonisasi dalam keagamaan ditinjau dari perspektif teori aristruktur perdamaian, kita perlu memahaminya secara integratif. Adapun teori yang terkait adalah aristrukttur perdamaian untuk mencapai kehidupan yang damai diperlukan beberapa unsur, yaitu struktur, integratif climate, peace leadership dll. Berdasarkan teori tersebut, tidak semua unsur harus eksis dan tampil dalam masyarakat, apalagi dalam lingkup yang sangat sempit. Asumsi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa ketika masyarakat memiliki salah satu dari beberapa unsur dari konstruksi perdamaian tersebut, maka hal tersebut sudah cukup untuk menjadi dasar dalam cara pandang masyarakat dalam bersikap dan berprilaku, selanjutnya keharmonisasian adalah sebuah keniscayaan yang dicita-citakan masyarakat tersebut akan tercapai.

Secara faktual asumsi ini juga di dasarkan pada fakta bahwa masyarakat di daerah pedesaan pada umumnya memiliki keunggulan dalam intensitas komunikasi antar anggota masyarakat yang sudah di reproduksi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan baik bersifat non formal maupun informal. Lembaga-lemabga kemasyarakatan inilah yang menjadi wadah atau channel off communication untuk saling berdialog. Berkomuniasi berdinamika tentang dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin banyak institusi-institusi non-formal maupun informal dalam

masyarakat maka akan menciptakan iklim-iklim kehidupan yang kondusif, sebagai salah satu prasyarat menuju kehidupan masyarakat yang harmonis.

Kondisi masyarakat yang harmonis yang mensyarakkan adanya perdamaian juga harus didukung oleh sikap keterbukaan dan upaya untuk melakukan dialog antar umat beragama (Mufid, 2011). Dialog antar umat beragama ini pada dasarnya bisa dianggap sebagai manifestasi dari adanya saluran komunikasi yang bagus (channels of communication) yang terbangun dalam masyarakat. Dari dialog antar umat beragama inilah yang diharapkan muncul sikap pluralitas kewargaan , dimana identitas-identitas yang ada dalam diri individu (agama, ras, budaya) bukan menjadi identitas pemisah, akan tetapi menyatu dalam identitas yang memiliki kepentingan lebih, lebih universal yaitu harapan untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan di tengah keberagaman (Munjid, 2009). Dengan demikian, harmoni kehidupan antar umat beragama yang di anggap hasil atau buah dari sikap dan sikap masyarakat yang mengedepankan toleransi pada keberagaman dan kewargaan.

Daftar Pustaka

Jubba, H. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.

Mahyudin. (2018). Dinamika Multikulturalisme Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Mahyuddin, M. (2019). Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12*(2), 111–122.

Mahyuddin. (2019a). The Crisis of Intolerance and Primordialism in the Name Of Religion in Indonesia: a Case Study Of Pilkada DKI Jakarta at 2017. *Kuriositas*, *12*(2019), 29–30.

Munjid Ahmad. (2009). *Prospek Pluralisme Agama Di Indonesia :Harapan Untuk Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan*. (Mety Herry & Anwar Khairu, Ed.). Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei.

Mufid, Ahmad, S. (2011). *Pluralisme, Dialog &Keadilan (Tantangan Berdemokrasi Dalam Negara Republik Indonesia.* (S. A. Prasetyo, Ed.). Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei.

Saerozi,M.(2004). *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Prularisme.*Yogyakarta: Tiara wacana.

MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN BUDAYA

A Jurana Anggriana

Secara etimologi, kata multikulturalisme berasal dari dua kata, yaitu multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan). Sehingga secara sederhana dapat dipahami sebagai "keberagaman budaya". Budaya yang dimaksud di sini adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan semua rangkaian aktivitas kehidupan manusia dalam alam sosialya.

Selain itu, multikulturalisme juga merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis maupun agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan keanekaragaman budaya (multikultur). Bangsa yang multikultur adalah bangsa dengan kelompok-kelompok etnik atau budaya (etnic and cultural groups) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Mahyuddin, 2017), (Mahyuddin, 2018).

Dalam konteks ini, multikulturalisme bermakna sebagai sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesedarajatan perbedaan kebudayaan (Setiadi dan Kolip, 2011). Ideologi multikulturalisme tercakup sebuah upaya untuk bergandengan tangan saling mendukung, bukan saling mengucilkan sehingga tercipta kehidupan harmoni meskipun terdapat perbedaan-

perbedaan yang sangat mencolok dengan batas-batas suku bangsa, budaya, sosial, termasuk agama itu sendiri.

Berkaitan dengan itu, amatlah penting mengkaji multikulturalisme dalam perspektif agama dan kepercayaan mengingat pada dekade ini, kita masih sering melihat pertentangan-pertentangan sosial yang mucul di masyarakat karena alasan perbedaan. Ada saja konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan. Hal ini bisa terjadi karena masih ada umat beragama yang menganggap bahwa agama yang ia yakini adalah yang paling benar dan menganggap agama lain salah atau tidak benar. Tidak jarang kita menemukan sekelompok masyarakat cenderung sulit menerima pendapat orang lain dan mereka hanya akan menerima pandapat orang lain jika pendapat tersebut sama dengan pendapatnya.

Antara Agama dan Budaya

Berbicara tentang agama dan budaya, tentu kita sangat mudah membedakannya. Bahwa agama bersumber dari Allah SWT (meskipun ada agama yang bersumber dari manusia juga), sedangkan budaya bersumber dari manusia atau masyarakat umum. Walaupun agama dan budaya berbeda, namun keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Melalui ajaran agama, terdapat corak budaya masyarakat bernuansa agama yang dihasilkan oleh manusia atau pemeluk agama tersebut yang sedikit banyak karena pengaruh kepercayaannya.

Di kehidupan sosial masyarakat, misalnya, kita mungkin pernah atau bahkan sering melihat praktek-praktek keberagaman yang bagi sebagian orang tidak terlalu jelas apakah itu merupakan bagian dari agama atau budaya. Contohnya saja tradisi tahlilan, tidak sedikit di kalangan

umat Islam yang beranggapan bahwa upacara tahlilan adalah kewajiban agama yang harus mereka selenggarakan meskipun dengan melakukan itu ia harus berhutang. Mereka merasa berdosa kalau tidak mengadakan tahlilan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Padahal yang diperintahkan oleh agama berkaitan dengan kematian adalah "memandikan, mengkafani, menyalatkan, mengantar ke makam, memakamkan, dan mendoakan". Sangat simpel dan hanya membutuhkan sedikit biaya, ini berarti bahwa upacara tahlilan pada dasarnya adalah tradisi, bagian dari budaya bangsa, yang mungkin telah ada sebelum datangnya Islam, yaitu tradisi kumpul-kumpul di rumah duka, yang kemudian diislamkan atau diberi corak Islam. Maka yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah membenahi pemahaman dan penyikapan umat terhadap praktek-praktek keberagaman seperti itu secara proporsional (Effendi, 2010).

Sekedar perbandingan bisa dikemukakan di sini kewajiban agama yang bernama qurban (sekali setahun) dan aqiqah (sekali seumur hidup). Qurban dan aqiqah adalah perintah agama meskipun kedudukan hukum fikihnya adalah sunnah mu'akkadah. Tapi di tengah masyarakat muslim secara umum, qurban dan aqiqah ini kalah pamor dibandingkan dengan tahlilan.

Pada prinsipnya, Islam datang ke suatu daerah (termasuk ke jazirah Arabia sebagai tempat kelahirannya) tidak untuk menghapuskan semua produk budaya termasuk tradisi yang sudah hidup di tengah masyarakat. Ada tradisi Arab (masa jahiliyah) yang dilarang, ada yang dibiarkan, ada yang dikembangkan, dan ada yang diislamkan dan dijadikan bagian dari ajaran Islam (Effendi, 2010).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa antara budaya dan agama seringkali membentuk adaptasi sosial tersendiri.

Budaya memengaruhi agama, sebaliknya agama memengaruhi budaya. Di sini kita bisa belajar bahwa telah terjadi pembauran. Dalam perspektif multikulturalisme, hal ini bagian dari ikhtiar untuk saling menghormati. Pada satu sisi keragaman budaya maupun agama yang warganya cenderung terbuka, akan saling mendorong agar menerima keragaman sekaligus juga melakukan asimilasi antara budaya dan agama.

Jejak Islam di Nusantara

Dalam rentang abad 13 hingga awal abad 19, Islam tumbuh secara kultural di bumi nusantara ini. Dari berbagai referensi menunjukkan bahwa Islam masuk ke negeri ini tidaklah melalui perang, melainkan dengan cara diplomasi. Inilah yang membedakan wajah Islam Indonesia dengan gelombang radikalisme yang sedang marak di masa kini.

Menurut catatan Syaiful Arif (2016) dalam Islam, Pancasila dan Deradikalisasi bahwa kedatangan Islam di Nusantara bukan sebagai "yang asing", yang hendak menjajah, tetapi agama lentur yang hendak menyempurnakan proses kemanusiaan secara lebih paripurna. Itulah sebabnya, terminologi konversi yang kerap digunakan dalam menimbang denyut Islamisasi Nusantara kurang tepat. Sebab konversi menandakan berlangsungnya penaklukan Islam atas agama lokal, sehingga yang terjadi bukan dialog antarbudaya, tapi ikonoklasme atau penghancuran ikon budaya lokal oleh apa saja yang datang dari luar.

Islamisasi di Nusantara berlangsung tanpa melukai, tanpa menghilangkan simbol-simbol agama dan kepercayaan pra-islam. Menurut Arif, bahasa yang pantas adalah adhesi, bahwa Islam dan agama pra-Islam mengalami proses dialog, dan karena itu orang Indonesia menjadi muslim tanpa kehilangan akar tradisinya. Hingga kini masih dapat disingkap wajah Islam Indonesia, yang mampu bersekutu dengan kearifan lokal tanpa harus mengakibatkan gesekan, apalagi memicu berbagai kegentingan.

Islam Indonesia yang tumbuh sejak berabad-abad silam adalah wajah yang terbuka, toleran, dan sadar kemajemukan. Islam tidak memberangus wadah-wadah kebenaran dari *local wisdom*. Wadah itu tetap dijaga, hanya isinya yang diluruskan, searah jalan ketauhidan. Pidato Ketua Umum PB NU, KH.Said Agil Siraj dalam acara puncak Hariah NU yang ke-91 (31/1/2017) mencontohkan proses akulturasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal dalam masyarakat Islam di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sampai kini warga muslim Kudus tidak mengonsumsi daging sapi demi menghormati para tetangganya yang beragama Hindu. Tradisi unik itu adalah warisan turun temurun yang dilestarikan oleh Sunan Kudus.

Dalam membangun masyarakat multikultur, masyarakat setempat sangat menghormati tradisi masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Artinya, ada upaya saling menghormati antara Islam dan umat Hindu karena mereka saling memberi tempat

sebagai sesama komunitas lokal. Dalam istilah KH. Abdurahman Wahid, Islam Indonesia telah mengalami pribumisasi. Oleh Gusdur disebutnya Islam telah membumi dalam kultur Indonesia.

Tentu saja monumentasi dari wajah Islam yang mengalami keberpaduan dengan kebudayaan itu, bukanlah hal yang terbentuk begitu saja. Dibutuhkan kesadaran bersama bagaimana membangun persamaan dalam perbedaan dengan memerhatikan hak-hak agama kelompok minoritas. Masyarakat Islam kala itu demikian menjaga apa yang kita sebut sebagai toleransi sosial di mana sistem keagamaan komunitas-komunitas masyarakat membentuk eksistensi nilai multikulturalisme itu sendiri dalam perikehidupan masyarakat.

Makna Agama dan Keberagamaan bagi Manusia

Seorang cendekiawan Muslim yang juga sejarawan, Syekh Muhyiddin al-Khayyath mengatakan, "Agama adalah kebutuhan hidup manusia". Baginya, manusia membutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman hidup, dan manusia lebih tunduk pada aturan agama daripada aturan lainnya. Inilah homo religius bahwa setiap manusia membutuhkan agama sebagai panduan kehidupan. Ini pulalah yang membedakan dengan binatang.

Kalau kita lihat negara-negara komunis yang identik dengan atheis ataupun negara-negara yang cukup jauh "menjauhkan diri" dari agama, maka akan terlihat kehidupan warga negara yang hedonis dan memiliki angka

kejahatan serta bunuh diri yang tinggi. Hal ini adalah bukti nyata bahwa memang apabila manusia jauh dari agama, atau tidak beragama, maka hidupnya akan kacau dan juga mengacaukan (Munawwir, 2015).

Berbeda dengan negara-negara yang mempunyai agama dan dekat dengan agama. Negara tersebut, akan menjadi damai, tentram,sejahtera dan jauh dari kata kacau. Karena negara yang di dalamnya masyarakatnya mempunyai agama dan taat pada aturan agama, hidupnya akan lebih terarah dan jauh dari yang namanya kekacauan.

Namun di negara yang agamis juga terjadi yang namanya kejahatan akan tetapi angka kejahatannya jauh lebih kecil dengan angka kejahatan di negara-negara yang tidak agamis. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Sosiologi Agama Prof. Mohammad Baharun, yang mengutip Emile Durkheim, bahwa kualitas kepaduan dan keharmonisan sebuah masyarakat akan memancarkan kualitas keagamaan. Semakin harmonis sebuah masyarakat, maka semakin meningkatkan kualitas keagamaannya. Korelasinya, semakin tinggi kualitas keagamaan, akan kian mencerminkan terwujudnya keharmonisan di masyarakat.

Di sini, agama mempunyai fungsi integrasi sosial (Mahyuddin, 2019). Nilai-nilai multikulturalisme yang terkandung dalam agama adalah agama menyediakan seperangkat nilai dan norma untuk melindungi individu dari berbagai gangguan yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Jika ditarik pada konteks multikulturalisme, memimpikan sebuah integrasi sosial demi cita-cita harmoni.

Daftar Pustaka

Arif, S. (2016). Islam, Radikalisme dan Deradikalisasi Berbasis Pancasila. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, *3*(2), 240.

Effendi, D. (2010). *Pluralisme dan kebebasan Beragama*. Institut Dian/Interfidei.

M. Mukhsin Jamil. (2014) 'Multikulturalisme Dalam Perspektif Agama Dan Kepercayaan', 2014. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id.

Ahmad Fuad Effendy. (2012). 'Antara Agama dan Budaya', *Malang*.

Mahyuddin, M. (2019). Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12*(2), 111–122.

Mahyuddin. (2018). Dinamika Multikulturalisme Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Munawwir, Syamsu-I Arifyn (2015). "Makna Agama Dan Keberagamaan Bagi Manusia", (Sumber: Buku Islam Indonesia di Mata Santri).

Mahyuddin. (2017). The Role of Social Capital Local Community in Multicultural Society Integration Process in Polewali, West Sulawesi. In *International Conference: Universal Academic Cluster (UAC - 2017),March 23-24 , 2017, Bangkok, Thailand* (Vol. 1, p. 71).

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahaan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Bandung: Kencana.

TOLERANSI MULTIAGAMA DAN MULTIKULTURAL JADI TALI PEMERSATU BANGSA

Silmi Qurota Ayun

Dalam kehidupan ini kita diberikan anugerahan yang luar biasa dalam hal kekayaan akan keberagama. Betapa tidak, kita diciptakan dengan berbagai macam bentuk yang berbeda, mulai dari bentuk tubuh, warna kulit, suku bangsa, budaya, dan agama untuk hidup berdampingan. Sebagai mahluk sosial yang tentu saling membutuhkan satu sama lain, sudah sepantasnya kita mensyukuri dan menyikapinya dengan baik dan bijaksana.

Di dalam kehidupan nyata, tidak semua kekayaan tersebut dapat beriringan secara baik. Adakalanya, ada-ada saja lika-liku permasalahan yang menghinggapi dalam menjalani hidup berdampingan tersebut. Sebagai contoh saja di negeri kita ini Indonesia, yang memiliki banyak sekali perbedaan mulai dari suku, ras, budaya, bahasa dan agama, hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri pasalnya sudah banyak sekali permasalahan yang dihadapi di negeri ini berkaitan dengan ketidakmampuan mengelola kemajemukan (Mahyuddin, 2019), Masyrullohushomad, 2019).

Beberapa konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik berbau agama. Yang paling tragis pernah meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak

Januari 1999, telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang tidak hanya merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat, melainkan menggerus toleransi sosial dan moderasi beragama (Mahyuddin, 2020). Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang meregang nyawa dan tragedi.

Tidak hanya itu, konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia juga pernah terjadi pada tahun 2001 silam yaitu, konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura. Ini merupakan salah satu konflik besar yang turut mempengaruhi segregasi sosial antaranak bangsa lantaran berkecamuknya konflik berkepanjangan. Berbagai pola resolusi konflik pun tengah diupayakan oleh pemerintah demi terwujudnya perdamaian dengan berbagai alternatif negosiasi (Hidayah, 2016).

Pembumian Toleransi Sosial dengan Pelembagaan Media Antar Iman

Secara bahasa istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* yang berarti membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa persetujuan. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah toleransi merujuk pada kata *tasamuh* yang berarti saling mengizinkan atau saling memudahkan. Artinya, seseorang dapat menenggang segala-perbedaan yang ada dalam lingkup kehidupannya.

Soerjono Soekanto memberikan definisi toleransi sebagai suatu sikap yang merupakan perwujudan pemahaman diri terhadap sikap pihak lain yang tidak disetujui. Di sini ada perwujudan sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) baik itu berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, maupun kebiasaan kelakuan dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Contohnya ialah toleransi agama, suku, ras, dan sebagainya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, tidak dimungkiri bahwa kita sekarang menghadapi persoalan politik kewargaan yang rumit kaitannya dengan perbedaan identitas. Sikap menghargai terhadap kemajemukan untuk mengakui eksitensi dan hah-hak orang lain, masih menjadi pekerjaan rumah bersama dalam mengelola problem bangsa kita. Dalam banyak hal, yang terjadi justru intoleransi yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang mendiskreditkan kelompok lain.

Realitas sosial saat ini yang dari masa kemasa membuat banyak perubahan, inteloransi justru tumbuh antara umat beragama. Konflik antara umat beragama semakin terlihat pada dekade ini. Meski kekerasan komunal berskala besar telah mereda sejak 2004, namun indisiden kekerasan antar- dan intra agama dalam skala kecil masih sering dan meluas di seantero Indonesia (Kusumaningrum, 2017).

Dari kondisi di atas penting untuk melembagakan mediasi antariman di Indonesia. Mengapa?

Kusunamaningrum dalam buku *"Agama Menggerakkan Perdamaian"* mengemukakan bahwa konflik-konflik bernunsa agama di seantero nusantara tidak selalu ditangani secara efektif oleh negara. Aparat kepolisian bekerja secara efektif di beberapa tempat, tapi tidak di tempat lain. Regulasi anti "ujaran kebencian" (*hate speech*) diberlakukan di beberapa kasus, tetapi tidak di kasus lain. Dengan demikian, proses mediasi antariman yang dipimpimpin kelompok sipil menjadi alternatif yang layak untuk menangani konflik antaragama sebagai salah satu strategi toleransi multiagama.

Bagaimana cara melembagakan? Tidak mudah untuk mencapai jalan ini. Apalagi jika sejak awal antarkelompok agama, memang sudah saling bermusuhan. Namun jika kita menyatukan persepsi bahwa penting untuk menyemai keharmonian dalam perbedaan, maka jalan mediasi ini akan mampu diwujudkan. Ini akan menjadi pintu masuk pihak-pihak yang bertikai yang memungkinkan mereka untuk bertemu, berhadapan, dan mengatasi prasangka.

Ashafa dalam Kusumaningrum (2017) memperkenalkan banyak strategi dalam upaya mediasi, seperti mengorganisasikan kegiatan bercerita (*story telling*), pameran seni, layanan kemanusiaan, acara olahraga dan lain-lain. "Begitu orang melakukan hal bersama, kita bisa mulai membuat mereka mendiskusikan hal-hal yang mengganggu mereka. Kita tidak perlu menyebut proses itu sebagai mediasi. Yang penting adalah kita membantu mereka berbicara satu sama lain".

Harmonisasi Ditengah Masyarakat Multikultural

Di antara prinsip yang perlu diterapkan untuk mencapai harmoni di tengah perbedaan adalah membumikan prinsip "mulitkulturalisme". Harapan untuk keadilan dan perdamaian benar-benar akan bisa digapai jika keragaman mampu dikelola sebagai kekayaan multikultural bersama yang memperkaya dan menyumbang pada wujud kolektifitas masyarakat (Effendi, 2015). Inilah cita-cita multikulturalisme. Masyarakat multikultural hendaklah mendorong warganya untuk bersikap terbuka dalam semangat menghargai keragaman.

Will Kymlicka menjelaskan meningkatnya struktur multikultural modern memunculkan berbagai konflik dan isu baru seperti minoritas nasional. Dari sinilah menurut Kymlicka perlunya pengakuan dan dukungan terhadap identitas kultural masing-masing kelompok. Hal yang diketengahkan dalam prinsip tersebut adalah pengakuan akan martabat manausia yang hidup dalam komunitasnya masing-masing dimana setiap individu dan kelompok akan merasa di hargai dan menyokong hubungan-hubungan politis yang tidak memandang agama, ras, etnis, golongan (Kymlicka, 2002).

Jika prinsip multikulturalisme bisa diterapkan, tiap-tiap kelompok etnis, menerima dan menyesuaikan elemen budaya etnis lain dalam lingkup masyarakat sehingga semakin merekatkan harmoni sosial di antara anggota masyarakat. Tiap-tiap kelompok etnis maupun agama yang dihadapkan dengan elemen budaya masyarakat lintas

kelompok secara bertahap akan menerima bentuk budaya kelompok lain. Sebab, masyarakat multikultural toleran terhadap perbedaan. Menghargai satu sama lain adalah sebuah salah satu perilaku kecil yang dapat membangun harmonisasi ditengah masyarakat dengan barbagai kalangan, berdampingan tanpa memaksa orang lain dan menghargai hak orang lain menjadi kunci utama dalam membangun keharmonian sosial (Mahyuddin, 2019).

Pengelolaan keberagamaan akan menjadi penguat ikatan kemanusiaan manusia. Manusia akan mudah berdampingan tanpa rasa canggung karena mereka yang sudah yakin dalam hati, pikiran, ucapan, dan tindakan bahwa keyakinan akan menuju pada "proses kebenaran". Proses kebenaran itulah yang akan melapangkan jalan manusia berkhidmat di dunia yang fana ini. Saat keberagamaan telah ternaungi, manusia akan saling membantu tanpa harus menggerutu, saling menjaga tanpa harus diminta. Kemanusiaan dan kebangsaan akan kukuh dengan sikap itu. Kita tidak akan pernah mendengar lagi laporan pencekalan seorang ustad yang akan berceramah di sebuah daerah dan perobohan masjid/gereja karena belum dapat izin. Sikap itu muncul karena kita masih dalam belenggu ikatan primordial yang sempit. Kita seakan hanya hidup dalam komunitas kecil.

Oleh karena itu, kesadaran dalam menghargai perbedaan (toleransi) adalah tonggak-tonggak membangun peradaban. Masyarakat harus lebih menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara multikultural, sehingga masyarakat

juga harus saling menghargai perbedaan yang ada, agar tercipta kehidupan yang baik dan rukun. Kita harus lebih banyak belajar dari berbagai kejadian masa lampau yang banyak merugikan kita agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali.

Untuk itu, mengkaji dan mereflesikan kembali apa sesungguhnya penyebab perpecahan bahkan konflik sosial, itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan bagaimana mengelola keragaman baik budaya maupun agama. Di sinilah arti pentingnya membangun toleransi multiagama dan multikulturalisme jadi tali pemersatu bangsa melalui kesadaran kolektif membangu kebersamaan dalam perbedaan.

"*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*".

Daftar Pustaka

Bakar, Abu. "Konsep toleransi dan kebebasan beragama." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7.2 (2016): 123-131.

Hidayah, M. S. (2002). Konflik Komunal dan Resolusi Damai: Studi Kasus di Kalimantan Tengah. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, *7*(13), 14-31.

Kymlicka, W. (2002). Kewargaan Multikultural. *Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan Oleh Edlina Hafmini Eddin*.

Soekanto, Soerjono.1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakrta: Universitas Indonesia Press.

Suparlan, Parsudi. (2014). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural." *Antropologi Indonesia.*

Masyrullahushomad, M. (2019). Mengokohkan Persatuan Bangsa Pasca Konflik Bernuansa Agama di Ambon dan Poso. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, *15*(1).

Mahyuddin. (2019). The Crisis of Intolerance and Primordialism in the Name Of Religion in Indonesia: a Case Study Of Pilkada DKI Jakarta at 2017. *Kuriositas*, *12*(2019), 29–30.

Mahyuddin, M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *13*(1), 103–124.

Mahyuddin, M. (2019). Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat

Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12*(2), 111–122.

Mahyuddin, M. (2019). *Sosiologi Komunikasi:(Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualitas)*. Makassar: Penerbit Shofia.

PENTINGNYA EDUKASI HARMONI DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Nur Aslina

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja tidak lepas dari yang namanya keberagaman di mana kita akan menjumpai berbagai macam perbedaan, baik secara personal maupun kelompok. Di situasi tersebut, kita tidak benar-benar aman dari sasaran kekerasan bernuansa identitas (Ahnaf dan Salim, 2017). Ya, keberagaman yang ada ditengah masyarakat tentu saja dapat beresiko menimbulkan sebuah kekerasan bahkan konflik sosial. Konflik yang terjadi bisa saja dilatarbelakangi oleh perbedaan bahasa, ras, suku bangsa, budaya termasuk agama.

Saat ini, keberagaman sangat perlu untuk dibahas bersama dalam menemukan titik temu suatu permasalahan yang ada. Masyarakat perlu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai macam perbedaan yang ada dan bagaimana mengelolanya. Mengapa? Sebab konflik akan terus terjadi dalam masyarakat yang berbeda ketika minim pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya edukasi harmoni di tengah keberagaman budaya.

Sebagai makhluk sosial tentu saja kita akan terus melakukan interaksi dengan orang lain. Terkadang dalam interaksi tersebut terjalin sebuah hubungan yang baik dan

juga hubungan yang buruk. Maka cara mudah untuk melihat harmoni atau tidaknya sebuah warga masyarakat yang berbeda adalah, apakah tercipta integrasi yang baik atau sebaliknya terjadi sebuah kesalahfahaman atau disintegrasi sosial (Mahyuddin, 2017). Dari sinilah perlu menanamkan edukasi harmoni dalam masyarakat mengingat perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam lingkup kehidupan sosial.

Pendidikan Multikulturalisme

Pendidikan multikulturalisme adalah pendekatan dalam pendidikan untuk membangun cara pandang dan pendekatan untuk mengakui keberagaman (Kymlicka, 2002). Setiap individu perlu untuk dihargai dan diakui sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Sebab, pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Berangkat dari realitas ini bahwa masyarakat yang multikultur, seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka, dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran, dan sikap terbuka. Transformasi pendidikan selayaknya juga mampu memberikan ide yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain materi dan metode serta kurikulum yang mampu menyadarkan

masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural (Unwanullah, 2012). Di sini, lembaga pendidikan dianggap sebagai wahana paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme. Sebab, dalam ideal, pendidikan seharusnya bisa berperan sebagai "juru bicara" bagi terciptanya fundamen kehidupan multikultural yang terbebas dari kooptasi negara.

Harus diakui bahwa multikulturalisme kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat sesuatu yang *given*, takdir Tuhan, dan bukan faktor bentukan manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, acap kali kita temukan suatu kelompok yang bertikai hanya karena perbedaan sosial terutama agama dan politik (Mahyuddin, 2019). Sangat disayangkan apabila dalam negara kita Indonesia terdapat begitu banyak pertikaian yang terjadi yang dilatarbelakangi oleh keberagaman budaya, agama, bahasa, ras dan lain-lain di mana kita ketahui bersama bahwa semboyan bangsa kita yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu.

Dalam pada itu, di sinilah acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu perlu menanamkan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Kymlicka, 2002), (Suparlan, 2014), Dalam

model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) perlu menjamin kelompok-kelompok minoritas terlindungi dari diskriminasi.

Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antarmanusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia (Suparlan, 2014).

Pendidikan multikulturalisme merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multukultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa. Sedangkan secara luas, pendidikan multikulturalisme itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama (Arif, 2014).

Hubungan Dominan-Minoritas

Terminologi minoritas mengacu pada perbandingan jumlah populasi yang lebih besar dan populasi kelompok kecil. Artinya, sebuah kelompok bisa disebut minoritas kalau jumlahnya signifikan lebih kecil dari sisa populasi dari sisa populasi lainnya (Budiman, 2005). Kelompok minoritas adalah orang-orang yang kadang kala dipisahkan dari kelompok mayoritas dan diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat dimana mereka itu hidup.

Karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi secara kolektif. Mereka diperlakukan sebagai orang luar dari masyarakat dimana mereka hidup. Mereka juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya, karena mereka dibatasi dalam sejumlah kesempatan-kesempatan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka yang tergolong minoritas mempunyai gengsi yang rendah dan seringkali menjadi sasaran olok-olok, kebencian, kemarahan, dan kekerasan. Posisi mereka yang rendah termanifestasi dalam bentuk akses yang terbatas terhadap kesempatan-kesempatan pendidikan, dan keterbatasan dalam kemajuan pekerjaan dan profesi.

Keberadaan kelompok minoritas selalu dalam kaitan dan pertentangannya dengan kelompok dominan, yaitu mereka yang menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak. Mereka ini mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang

ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan pada adanya (1) perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; (2) sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka bahwa golongan minoritas yang rendah derajatnya itu adalah berbeda dari mereka dan tergolong sebagai orang asing; (3) adanya klaim pada golongan dominan bahwa sebagai akses sumber daya yang ada adalah merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan rendah derajatnya itu akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut.

Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu pada tindakan-tindakan perlakuan yang berbeda dan merugikan terhadap mereka yang berbeda secara askriptif oleh golongan yang dominan. Yang termasuk golongan sosial askriptif adalah suku bangsa (termasuk golongan ras, kebudayaan suku bangsa, dan keyakinan beragama), gender atau golongan jenis kelamin, dan umur.

Berbagai tindakan diskriminasi terhadap mereka yang tergolong minoritas, adalah pemaksaan untuk merubah cara hidup dan kebudayaan mereka dimana pola-pola kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat majemuk sering kali dipaksa untuk diikuti. Berbagai kritik atau pertentangan terhadap dua pola yang umum dilakukan oleh golongan dominan mempunyai kekuatan berlebih dan dapat memaksa kehendak mereka baik secara kasar dengan kekuatan militer dan atau polisi atau dengan menggunakan

ketentuan hukum dan berbagai cara lain yang secara sosial dan budaya masuk akal bagi kepentingan mereka yang dominan.

Menurut pendapat Parsudi Suparlan, cara yang terbaik adalah dengan merubah masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat multikultural (*multicultural society*), dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ideologi multikulturalisme ini mendorong kita untuk saling bergandengan tangan, saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komuniti atau masyarakat setempat.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, mau tidak mau kita harus mempunyai kesadaran tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia untuk hidup dalam berbagai macam perbedaan, baik itu agama, budaya, suka, bahasa dan lain (Mahyuddin, 2018, Mahyuddin, 2020). Memahami perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat, menuntut kita untuk bisa hidup secara berdampingan, bergandengan tangan dan saling merangkul satu sama lain, dengan tidak mengedepankan sikap ego yang mengabaikan hak-hak orang lain. Inilah esensi edukasi harmoni sosial di tengah keberagaman.

Dengan demikian, penting untuk selalu menarasikan edukasi harmoni dalam keberagaman. Dengan begitu, akan

tercipta harapan hidup yang damai, saling menghormati, dan saling memberikan kebebasan menjalanankan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Perlu dipahami bahwa kerukunan ataupun perdamaian tidak terjalin begitu saja, namun dicapai dengan adanya sikap yang saling menghargai dan saling menghormati atau yang lebih sering kita dengar yaitu toleransi. Itulah pentingnya mengapa kita harus memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai masyarakat multikultural agar kita mampu hidup dengan damai dan harmonis, dan jauh dari kata pertikaian ataupun konflik dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Budiman, H. (2005). *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Interseksi Foundation.

Arif, M. (2014). Model Kerukunan Sosial pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis dan Sosiologis). *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, *1*(1), 52–63.

Ahnaf, M. Iqbal & Salim, H. (2017). *Krisis Keistimewaan; Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS UGM.

Kymlicka, W. (2002). Kewargaan Multikultural. *Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan Oleh Edlina Hafmini Eddin*.

Mahyuddin, M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *13*(1), 103–124.

Mahyuddin, M. (2019). Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12*(2), 111–122.

Mahyuddin, M. (2019). *Sosiologi Komunikasi:(Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualitas)*. Makassar: Penerbit Shofia.

Suparlan, P. (2014). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. *Antropologi Indonesia*.

Unwanullah, A. (2012). Tranformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondais Dan Aplikasi*, *Vol. 1*, *No*, 45–57.

DIMENSI MODAL SOSIAL DAN KEMAJEMUKAN BANGSA DI MASA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Nur Nadia Rahma

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam, pluralistik, atau multikulturalistik. Kondisi masyarakat ini disebut oleh banyak pakar sebagai wujud kekayaan yang tidak ternilai. Namun bersamaan dengan itu, tidak dimungkiri bahwa keharmonian sosial saat ini tengah terancam bersebab pandemi (Mahyuddin, 2020), (Nurkidam et all, 2020). Ya, pandemi telah memengaruhi bahkan mengubah tatanan sosial masyarakat saat ini yang turut memengaruhi dinamika kebersamaan sosial.

Pandemi COVID-19 ini membuat banyak pihak dihadapkan pada kekhawatiran, yang diantaranya sebagian memilih jalan sendiri-sendiri untuk menghadapinya. Dengan kata lain, muncul semacam perasaan individualis bahkan apatis. Betapa tidak, ketakutan terhadap virus membuat sebagian kelompok masyarakat saling menghindari satu sama lain padahal hal yang paling kita perlukan saat ini adalah saling menguatkan dan bergotong royong.

Pandemi sebagai Ujian Bersama

Ketika bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sedang diuji dengan virus Corona (COVID-19), maka sudah seharusnya musibah tersebut ditempatkan sebagai

bagian dari bencana atau cobaan yang mengingatkan kita untuk tetap kuat membangun kebersamaan di tengah keterbatasan kita. Ini juga untuk membuktikan bahwa sebagai makhluk sosial, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak bukan hanya berupaya untuk bisa keluar dari serbuan ujian virus Corona, disamping juga tetap mampu memainkan peran sosial untuk saling membantu tanpa memandang ras, suku, golongan, bangsa dan agama.

Di masa pandemi COVID-19, ada indikasi kuat jika diantara kelompok-kelompok masyarakat banyak yang belum bersatu padu. Dan itu tidak jarang dilatari karena perbedaan pandangan, keyakinan dan sebagainya. Kita saksikan banyak muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan penyebaran virus hanya karena mengedepankan egoisme atau tanpa perduli dengan orang lain (Agung, 2020).

Jika fenomena semacam ini tidak terhindarkan, maka kebersamaan kita bukan hanya akan rapuh, tetapi juga akan membuat kebersamaan semakin tercerabut termasuk virus Corona yang membentang luas akan tetap mengintai kita. Kita demikian yakin bahwa kita akan bisa melewati (mengalahkan) masa-masa sulit ini, jika kita memang terus berusaha menunjukkan kapabilitas kerjasama. Apalagi sebagai bangsa yang besar, kita dapat memanfaatkan segala modal sosial kita untuk bersatu padu mengelola masalah-masalah yang dihadapi bersama (Mahyuddin, 2019), (Wahyu & Kustiningsih, 2020).

Ancaman terhadap Kebersamaan dan Modal Sosial Kemajemukan

Jika wabah ini berlangsung lama, bukan tidak mungkin ini memengaruhi kebersamaan sosial kita. Kita demikian khawatir jika hubungan-hubungan kita akan merenggang. Tanpa menjalankan strategi dan langkah yang lebih terarah dalam mengelola jarak sosial yang nyata atau berlandaskan pada saling bantu membantu bukan tidak mungkin dampak pandemi COVID- 19 bakal memicu ancaman integrasi sosial. Apalagi di lain sisi, selama pandemi ini berlangsung sejumlah imbauan secara moral dan spiritualitas yang sangat serius yang coba ditunjukkan oleh seluruh elemen bangsa ini, diantara kita masih banyak yang abai bahkan menganggap pandemi sebagai konspirasi.

Di situasi ini, kita akan sulit menyemai persatuan dan kepedulian bersama. Maka tuntutan atau ajakan untuk "bersatu" atau "bersama" menjaga kebersamaan menjadi sangatlah penting. Itu merupakan pesan kabangsaan yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Betapa tidak, tidak mustahil bangsa ini akan mengalami ancaman yang lebih berat lagi jika hal-hal yang sifatnya menjaga kebersamaan tidak bisa diatasi atau diselesaikan.

Jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bersama atau bersatu, khususnya dalam menghadapi serangan Corona, saya kira kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama. Negara ini bukan satu kali mengalami masalah. Kita pernah atau berkali-kali menghadapi krisis, tetapi faktanya tetap bisa keluar dari

masalah. Hal tersebut karena kita punya banyak modal sosial. Keragaman sosial, budaya dan agama yang kita miliki mampu mendorong dan membawa kesatuan hidup, sehingga bisa memecahkan masalah serius bangsa.

Hal inilah yang harus terus dijaga di masa pandemi COVID-19. Bahwa ada tuntutan untuk menyikapi keragaman sebagai kekayaan untuk bersama-sama mencari solusi. Virus ini mengajak setiap subyek bangsa, apapun agama, politik, budaya, etnis, ekonomi, pendidikan, dan lainnya untuk banyak memberikan cinta pada sesamanya. Maka kekayaan ini harus dimanfaatkan untuk mendampingi atau membebaskan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Minimal kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu.

Kita selama ini masih lebih sering menunjukkan pola sikap dan perilaku yang mencerabut kesatuan dan keharmonisan bangsa. Disharmonisasi sosial masih sering mencuat akibat adanya sikap atau perilaku seseorang atau sekelompok orang yang menghadirkan gaya monologis dan eksklusif, yaitu menempatkan dirinya dan kelompoknyalah yang paling benar dan wajib diikuti, sementara yang perlu kita rekatkan dan bangun di masa-masa sulit ini adalah selalu saling mendukung.

Demikian itulah model seseorang dan sekelompok orang yang sejatinya tidak paham kebhinekaan, sehingga pemikiran dan perilakunya harus direkonstruksi secara terus menerus. Mereka wajib diberikan pemahaman supaya menjadikan Indonesia tetap sebagai "rumah" besar yang memayungi keragaman etnis, golongan, agama, politik,

budaya, dan lainnya, terlebih saat menghadapi serangan COVID-19 ini. Pengedukasian itu bukan hanya menjadi wujud pengakuan terhadap eksistensi hak keberagaman, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk penguatan sisi kemanusiannya. Langkah ini penting sebagai wujud gerakan riil masifikasi atau perluasan kecerdasan nurani berbasis pemedulian kemanusiaan.

Filosof Cicero pernah menyatakan, *mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo* yang maknanya hati nurani saya bernilai lebih banyak daripada semua khotbah. Cicero secara tidak langsung mengajarkan, bahwa pemosisian model intoleransi dan eksklusifisme sebagai wujud gerakan pembenaran eksklusifitas dan monologis oleh seseorang dan segolongan orang harus dijawab (dikalahkan) dengan memperbanyak pencerdasan nalar dan pembeningan nurani yang diwujudkan dalam aksi-aksi humanitas inklusif.

Mengedepankan sikap dan perilaku kebhinekaan dalam wujud masifikasi aksi-aksi kemanusiaan dalam relasinya dengan COVID-19 ini juga merupakan panggilan pengabdian universalitas terhadap realitas kondisi riil masyarakat Indonesia yang multikultural. Perlu ada gerakan terobosan bersama yang memberi harapan terhadap seluruh warga agama dan negara untuk melakukan tindakan konkrit menghadapi masalah-masalah bersama di masa pandemi ini.

Guna menciptakan dan membumikan kultur saling memanusiakan atau mengapresiasi antar masing-masing orang dalam keragamannya, khususnya saat ada banyak "saudaranya" yang mengalami kesulitan, terutamaka

kesulitan ekonomi di tengah terjangan pandemi Corona ini, maka tidak ada jalan lain kecuali bersama-sama berpartisipasi memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan kebangsaan dan kemanusiaan yang semakin nyata sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bersama. Setidaknya meminimalisasi beban kesulitan ekonomi "saudaranya" baik seiman maupun tidak seiman.

Jika dalam menghadapi Corona ini, masing-masing subyek sosial, politik, agama, budaya, dan lain sebagainya "berkompetisi" dalam menjalankan, menabur dan menyuburkan kebajikan (kemanusiaan) untuk semua, maka jargon "bersama melawan COVID-19" akan bisa terwujud atau berhasil membumi di tengah masyarakat. Saat negara masih saja belum benar-benar pulih secara ekonomi, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa bersama-sama melewatinya dengan modal sosial yang kita miliki di mana masing-masing pihak terlibat terlibat dalam memberikan solusi, mencakup dan mewadahi semuanya tanpa memandang latar belakang sosial.

Saatnya Bersatu

Dari apa yang sudah diuraikan di atas, maka instrumen untuk menjaga persatuan dan kesatuan (kemajemukan) pokok yang diharapkan sebagai pendukungnya adalah kita jadikan keberagaman kita untuk mengembangkan kapasitas menghadapi pandemi ini. Kekayaan berbentuk kebinekaan di berbagai sisi kehidupan kita jadikan sebagai energi sosial yang mendorong tindakan

bersama untuk merekatkan persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pandemik virus COVID-19.

COVID-19 tidak bisa dihadapi sendirian, melainkan membutuhkan kekuatan kebersamaan dan saling tolong menolong. Seperti ungkapan Yuval Noah Harari bahwa penangkal sesungguhnya dari epidemi bukanlah segregasi (jarak sosial), melainkan kerja sama. Apalagi kita memang memiliki warisan budaya "gotongroyong". Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini dalam masa perang melawan virus, akan menjadi ringan tatkala kita berjuang bersama (Mahyuddin, 2020).

Daftar Pustaka

Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, *1*(2), 68–84.

Kusnitingsih, W. & N. (2020). Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi COVID-19. In *Tata Kelola Pengangan COVID-19 di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Mahyuddin, M. (2019). Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12*(2), 111–122.

Mahyuddin, M., Ilham, I., & Rusdi, M. (2020). Horor Coronavirus Deseases dan Konflik Kekerasan Masyarakat: Tinjaun Sosiologis atas Penolakan Jenazah Pasien Covid-19. *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, *3*(1).

Mahyuddin. (2019). Local Wisdom and Anemia Prevention: Study of The Use of Herbs As Alternative Treatment for Rural Communities in West Sulawesi, Indonesia. In *2019 Korean Society of Hematology International Conference and 60th Annual Meeting* (Vol. 54, p. 329).

Nurkidam, A., Bakri, M., Saleh, M., Mustary, E., Budiono, I. N., Rasyid, A., … Syam, M. T. (2020). *Coronalogy: Varian Analisis & Konstruksi Opini*. IAIN Parepare Nusantara Press.

SPIRIT AGAMA DAN KRISIS BUDAYA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Ilham

Beberapa waktu belakangan, dunia dikejutkan dengan pandemi virus Corona (COVID-19) yang melanda manca negara. Tidak ada yang menyangka bahwa virus Corona tersebut mengguncang segala aspek lini sosial kehidupan manusia. Umat manusia benar-benar terkejut dengan dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Tak pelak, setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menghadapi situasi pandemi ini.

Kasus COVID-19 sudah menjadi pandemi global. Virus yang awal mulanya terdeteksi di Wuhan, China, pada Desember 2019, kemudian berkembang pesat sehingga banyak korban jiwa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu penyebab cepatnya penyebaran virus yang segolongan dengan sars dan MERS CoV ini adalah banyaknya riwayat perjalanan internasional (Farzanegan et all, 2020). Dalam perkembangan terakhir, total kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya di Indonesia. Per 15 juni 2020 kasus di Indonesia telah mencapai 36.118. (Gugus Tugas COVID-19, 2020).

Menyikapi hal tersebut, salah satu solusi yang diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 adalah "*social distancing*". Penerapan *social distancing* pada dasarnya adalah cara menjaga jarak

sosial, yaitu dengan menghindarkan diri dari keramaian atau tempat perkumpulan.

Setelah sebelumnya pemerintah pusat mengumumkan untuk "*libur*" bagi seluruh instansi dan lembaga dan menggantikannya dengan layanan yang bersifat "*online*", kini pemerintah memutuskan bahwa proses *social distancing* juga diterapkan dalam konteks beribadah. Ini tercantum, antara lain, dalam Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID 19) yang kemudian dipertegas dengan hadirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang panduan dan tata cara peribadatan di masa pandemi.

Agama dan Akal Budi di Tengah Pandemi

Di tengah sengkarut penyebaran virus Corona, agama dihadapkan pada dua kondisi. Satu sisi agama punya andil besar dalam penyebaran virus di mana banyak kasus baru COVID-19 terjadi karena aktivitas keagamaan yang mengabaikan protokol kesehatan. Meski pemerintah telah melarang tetapi pada tataran praktik beberapa kelompok keagamaan masih mengadakan perkumpulan, beribadah di masjid, bahkan ada yang dengan tegas menentang anjuran pemerintah.

Namun, pada sisi tertentu tidak dinafikan bahwa peran agama juga memiliki kontribusi nyata dalam meminimalkan penyebaran virus corona (Pabbajah dkk,

2020). Tidak dimungkiri bahwa lahirnya fatwa ulama tentang tata cara ibadah di masa pandemi, secara signifikan dapat mengontrol jumlah kasus baru. Di sini terlihat pada kelompok-kelompok agamawan yang berperan aktif menyerukan jemaah-nya untuk taat pada "pembatasan sosial" (*social distancing*) dan "pembatasan fisik" (*physical distancing*).

Dalam kondisi tersebut, kita bisa memahami bahwa agama tentu pada akhirnya bukanlah sekadar kumpulan abstrak doktrin atau kitab suci yang sudah fixed. Kehadiran manusia sebagai bagian realitas dan sekaligus sebagai pengkaji realitas mampu menawarkan gagasan-gagasan solusi. Ini tampak terutama dalam praktik ibadah yang difleksibelkan. Meski ada sekelompok agama yang seringkali terjebak dalam praktik beragama yang terlalu sempit, namun hadirnya fatwa ulama semakin menegaskan bahwa agama tidaklah sesempit seperti yang sebagian orang pahami.

Pertanyaannya adalah bagaimana spirit agama tersebut justru dapat membangkitkan energi untuk membangun peradaban Indonesia di tengah pandemi? Dengan peran agama kehancuran akibat pandemi sangat mungkin dihindari dengan persatuan masyarakat agamanya, terutama saling mendukung antara kelompok. Dikeluarkannya regulasi (aturan) baik dari pemerintah maupun tokoh agama yang dapat mengayomi seluruh entitas masyarakat beragama, menjadi pintu masuk bagi agama dalam menyelesaikan masalah penyebaran COVID-

19 terutama ketaatan masyarakat dalam menekan penyebaran virus.

Karena itu, amatlah elok jika masyarakat beragama mendukung seluruh kebijakan pemerintah dan tokoh agama kaitannya dengan penanganan pandemi selama dalam koridor yang tepat dan bertujuan melindungi masyarakat. Hemat penulis, dari sini kita bisa melihat bekerjanya spirit agama, yaitu tokoh agama berperan menggerakkan energi agama untuk mengarahkan jamaahnya pada sikap-sikap yang terbuka dalam melihat perubahan sosial akibat pandemi.

Perubahan sosial kultural masyarakat di masa pandemi yang sedang merangsek pada setiap sendi kehidupan manusia saat ini patut menjadi perhatian masyarakat agama. Sudahkah masyarakat agama di Indonesia meletakkan agama sebagai agen perubahan untuk membangun peradaban bangsa di tengah keterpurukan sebagai imbasan nyata dari pegebluk? Ini menjadi pekerjaan rumah bersama di tengah pandemik COVID-19. Setiap hari data pasien COVID-19 terus bertambah. Ada yang masih sembuh, masih dalam perawatan, juga meninggal. Kita bisa menyaksikan setiap perkembangan ini di media digital. Di sini lah peran agama dapat dimaksimalkan. Momentum COVID-19 dimungkinkan untuk menanggalkan konservatisme beragama. Caranya adalah terbuka untuk berdialog dan mengimbau penganutnya masing-masing agar taat pada para ahli ilmu kesehatan, ahli keamanan publik,

maupun pada otoritas yang berwenang menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan warganya.

Para kiai, pastor, pendeta, biksu, sesepuh, alim-ulama memiliki andil yang sangat besar untuk mendidik dan memberikan teladan bagaimana menjadi warga negara yang taat hukum demi kemaslahatan bersama. Bukankah demikian jelas dalam agama kita (Islam), bahwa melindungi satu nyawa itu seperti menyelamatkan seluruh kehidupan manusia. Ini tidak didapatkan secara tiba-tiba jika model beragamanya tidak dicontohkan oleh para petinggi agamanya.

Beragama dengan tidak mengabaikan sains, ilmu kesehatan khususnya dalam masa pandemi COVID-19 itu sangat diperlukan saat ini dan di masa mendatang. Apalagi khususnya bagi umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Inti dari sembilan butir isi fatwa MUI adalah imbauan menjauhi setiap hal yang diyakini bisa menyebabkan paparan penyakit.

Inilah spirit agama Islam di tengah Pandemi yang diprakarsai ulama-ulama kita. Melaui MUI, kita dianjurkan melakukan ibadah di rumah. Bahkan ibadah salat Jumat dapat diganti dengan shalat Duhur untuk menghindari kerumunan. Tak cuma itu, ketika umat berada di kawasan penularan potensi tinggi, mereka boleh meninggalkan jamaah salat lima waktu/rawatib, tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

Mengenai hal ini, sebagian ulama telah memfatwakan bahwa orang yang telah terpapar virus Corona haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan. Sebagaimana dinyatakan Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin Abdul Fatah dalam rilis yang disampaikan kepada media-media nasional bahwa COVID-19 adalah musuh yang harus dilawan bersama. Ego pribadi yang hanya memikirkan surga dan neraka tanpa memedulikan penyebaran kepada sesama hanya membuat kita kalah melawan wabah ini.

Pandemi dan Dampaknya terhadap Kebudayaan Masyarakat

Seperti yang kita ketahui, COVID-19 menjadi salah satu pandemi yang menyebar dengan cepat. Biasanya, virus ini dapat menyebar melalui kontak fisik, sehingga salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah membatasi kontak fisik yang diturunkan pada sebuah instruksi bernama Physical Distancing atau pembatasan/penjarakan fisik.

Istilah yang sempat dikenal dengan *social distancing* ini merupakan suatu upaya membatasi berkumpulnya orang banyak, menutup gedung-gedung serta membatalkan berbagai acara. Tentunya, dengan membatasi berkumpulnya masyarakat dan berbagai acara yang dibatalkan menimbulkan dampak yang besar bagi kebudayaan masyarakat.

Sejak diberlakukannya pembatasan fisik di Indonesia, berbagai permasalahan mengenai budaya dan kebudayaan

masyarakat tidak henti-hentinya bermunculan. Berbagai kasus pengucilan dan penolakan terhadap pasien terjangkit, terduga COVID-19 maupun tenaga kesehatan terjadi di berbagai daerah. Ketakutan masyarakat akan penyebaran COVID-19 menimbulkan suatu sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Di sinilah nampak krisis budaya masyarakat kita. Itu amat nyata di lihat pada persitiwa-peristiwa sosial lain, bahwa telah terjadi berbagai kekerasan sosial akibat perubahan sosial budaya di masa pandemi (Mahyuddin, dkk 2020).

Kebudayaan memang terkena dampak yang luar biasa dengan adanya pandemi, mulai dari perubahan tingkah laku masyarakat hingga terancamnya eksistensi kebudayaan itu sendiri. Walaupun, kebudayaan tidak akan pernah mati dengan kondisi sedarurat apapun. Sebab, jika kembali mengutip definisi budaya menurut Kluckhohn, usaha menjaga kebudayaan saat ini menjadi perangkat yang digunakan oleh masyarakat untuk menghadapi berbagai permasalahan ke depan adalah bagian dari budaya itu sendiri. Contohnya, budaya berjabat tangan saat bertemu seseorang, padahal saat dua orang berjabat tangan, ini artinya mereka bisa menempelkan berbagai virus, bakteri, maupun kuman yang ada di tangannya ke tangan orang lain, maka dilakukanlah cara berjabat tangan yang baru.

Namun, terlepas dari hal tersebut, krisis budaya juga tidak terbantahkan. Contohnya adalah tradisi makan bersama, atau tradisi berkumpul bersama saat pulang

kampung atau saat perayaan hari besar keagamaan, ini secara perlahan mulai hilang dari peredaran.

Oleh karena itu, sangat nyata jika wabah ini terkait erat dengan sosial-budaya bahkan agama, satu sisi muncul spirit agama namun sisi lain juga budaya mengalami krisis. Dari sini perlu penanganannya juga harus mempertimbangkan aspek sosial-budaya serta agama. Oleh karena itu pilar-pilar sosial untuk keluar dari kemelut pandemik ini adalah menempatkan orang yang lebih paham tentang situasi dan kondisi sosial budaya dan agama masyarakat sebagai patron memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah masyarakat.

M. Fajri membagi beberapa hal yang dapat dalam dilakukan sebagai pilar-pilar sosial membangun kekuatan sosial di masa pandemi melalui kegiatan berikut ini: a) Membuat sosialisasi pencegahan virus Corona berbasis budaya lokal. Hal ini bertujuan agar masyarakat mudah mengingat, memahami dan mempraktekan cara pencengahannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan nya adalah pilar-pilar sosial melakukan sosialisasi cara pencegahan virus corona melalui perilaku hidup bersih dan sehat dalam bentuk cerita, nyanyian, dan sebagainya dengan mengangkat kekhasan budaya daerah masing-masing sehingga masyarakat mudah memahami. (b) Pilar-pilar sosial melakukan himbauan kepada masyarakat menggunakan bahasa yang sederhana dan dilakukan sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Contonya adalah pilar-pilar sosial menterjemahkan penerapan *social*

distancing dan *physical distancing* kedalam bahasa daerah masing-masing sehingga langsung mengerti maksud dan tujuannya. (c) Dalam kampanye penanganan COVID-19 harus melibatkan pemimpin adat dan tokoh masyarakat lainnya. Pelibatan pemimpin adat dan tokoh masyarakat ini bertujuan agar masyarakat lebih mendengar himbauan yang berasal dari petinggi mereka sendiri sehingga lebih membawa dampak yang cukup signifikan. (d) Apabila memungkinkan, pilar-pilar sosial dapat menstimulus lahirnya aturan adat atau aturan desa yang bertujuan mensukseskan penanganan dan pencegahan COVID-19. Hal ini dikarenakan aturan adat dan desa dirasakan lebih dekat dimasyarakat.

Dengan demikian, Indonesia dengan keragamannya, meliputi suku, budaya, tradisi, bahasa, sampai kepada keragaman agamanya tidak mudah untuk menyelaraskan kesepahaman di tengah situasi pandemi. Adakalanya kesepakatan baik berupa kebijakan pemerintah maupun fatwa ulama dapat dijalankan secara bersama. Pada saat yang sama, tidak jarang kita menemukan sekelompok orang yang berseberangan dengan apa yang telah dicanangkan bersama.

Di sinilah peran agama dapat dihadirkan. Tidak mudah memang, apalagi hadirnya pandemi juga banyak membawa perubahan budaya. Kebudayaan memang terkena dampak yang luar biasa dengan adanya pandemi, dari perubahan tingkah laku masyarakat hingga terancamnya eksistensi kebudayaan itu sendiri. Tetapi,

dengan berbagai usaha yang dilakukan serta sinergitas yang terjalin antara pemerintah, pekerja seni dan budaya serta tokoh agama dan masyarakat, maka benih-benih sejati keselarasan sosial dapat disemai dalam keadaan sekarang yang sedang tidak baik-baik saja.

Kita sudah membayar sangat mahal untuk mendapatkan pelajaran bahwa tidak ada yang lebih trangis dan lebih kejam ketimbang mempertentangkan sains dan agama. Walaupun pada akhirnya kebudayaan akan terkikis namun kita demikian yakin bahwa prioritas pertama dalam menjalankan kewajiban agama kita terhadap orang lain adalah senantiasa menempatkan kemaslahatan bersama menuju kemanusiaan sejati.

Daftar Pustaka

Farzanegan, M. R., Feizi, M., & Gholipour, H. F. (2020). Globalization and outbreak of COVID-19: An empirical analysis.

M.fajri,Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Tengah Pandemi Covid-19, http://puspensos.kemsos.go.id/sistem-sosial-budaya-masyarakat-pedesaan-di-tengah-pandemi-covid-19

Mahyuddin, M., Ilham, I., & Rusdi, M. (2020). Horor Coronavirus Deseases dan Konflik Kekerasan Masyarakat: Tinjaun Sosiologis atas Penolakan Jenazah Pasien Covid-19. *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, *3*(1).

Mahyuddin. (2019). Local Wisdom and Anemia Prevention: Study of The Use of Herbs As Alternative Treatment for Rural Communities in West Sulawesi, Indonesia. In *2019 Korean Society of Hematology International Conference and 60th Annual Meeting* (Vol. 54, p. 329).

Pabbajah, M., Said, N. M., Pabbajah, M. T. H., & Jubba, H. (2020). Deauthorization of the Religious Leader Role in Countering Covid- 19 : Perceptions and Responses of Muslim Societies on the Ulama ' s Policies in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, *9*, 262–273.

MERAJUT TOLERANSI SOSIAL DI MASA NEW NORMAL

Fitriani

Wabah virus corona kini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa dengan beredarnya kabar virus corona yang telah merambah masuk ke Indonesia, berdampak pada psikis masyarakat yang menjadi lebih over-protektif terhadap lingkungan sekitar. Ketakutan terhadap virus corona telah memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu dimana masyarakat sangat mudah menaruh rasa curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat disekitar lingkungan. Bahkan tidak sedikit terjadi konflik kekerasan di masyarakat (Mahyuddin et all, 2020).

Ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa curiga, takut, sikap over-protektif dalam merespon isu corona ini memiliki potensi untuk merusak hubungan sosial dengan individu lain. Kita saksikan di berbagai tempat, terjadi tindakan-tindakan yang memaksakan kehendak yang menggerus semangat toleransi dan solidaritas sosial di masa pandemi ini.

Sebenarnya, rasa cemas dan ketakutan pada diri masyarakat atas wabah virus corona adalah hal yang manusiawi. Ya, adalah hal lumrah tatkala kita berupaya untuk menghindar demi memutus mata rantai pentebaran virus karena memang kepanikan dan ketakutan tidak dapat

ditutup-tutupi (Rasyid, 2020). Namun, jika dilakukan secara tidak bijak, maka yang terjadi adalah disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat.

Seiring berjalannya waktu istilah 'new normal' mulai mencuat belakangan ini ketika sejumlah negara melonggarkan penguncian setelah kasus virus corona di negara tersebut melandai. Istilah new normal, merujuk pada kondisi kehidupan usai pandemi virus corona dengan berbagai protocol kesehatan yang berlaku.

Pandemi: Dari Disorganisasi ke Disfungsi Sosial Masyarakat

Disorganisasi sosial adalah gangguan atau keterputusan struktur hubungan sosial dan nilai-nilai yang mengakibatkan hilangnya control sosial atas perilaku individu dan kelompok, pengembangan isolasi dan konflik sosial, dan rasa keterasingan dari arus utama budaya seseorang dalam kondisi atau keadaan anomie (Soekanto & Sulystyowati, (2013). Disorganisasi masyarakat mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berdampak pada tatanan sosial di masyarakat. Wujud nyatanya adalah berupa prasangka dan disikriminasi. Sedangkan, disfungsi sosial adalah kondisi seseorang tidak mampu melaksanakan peran sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan sesuai dengan harapan orang lain.

Sebagaimana halnya dengan hadirnya virus COVID-19, disfungsi sosial juga terjadi akibat rasa takut atas wabah virus tersebut. Disfungsi sosial membuat seseorang atau

kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya. Sejak merebaknya virus corona, sedikit banyak berpengaruh terhadap tatanan hidup masyarakat, bukan hanya itu, kondisi kesehatan fisik, mental serta spiritual masyarakat juga ikut terganggu. Sehingga berpeluang besar menyebabkan pergeseran tatanan nilai sosial dan budaya di dalam masyarakat. Hal yang nyata yang dapat kita lihat belakangan ini yakni memudarnya rasa solidaritas pada diri masing-masing individu. Hal yang menyebabkan kondisi serupa yakni adanya rasa takut berlebih akan penularan virus yang mematikan ini, sehingga tak ayal masyarakat menciptakan sekat di dalam berkehidupan sosialnya. Ancaman seperti ini apabila dibiarkan terus menerus akan merusak tali persaudaraan bahkan memutus silaturahmi antar individu di dalam sebuah kelompok.

Tak hanya itu, tidak sedikit orang yang sengaja memanfaatkan situasi di tengah merebaknya COVID-19 ini dengan cara pembuatan konten-konten yang bernuansa hoax yang menambah kepanikan dan ketakutan masyarakat luas, dalam ilmu sosiologi hal semacam ini dikatakan "patologi sosial" (penyakit sosial) sehingga cenderung melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan dalam menyikapi pandemi ini.

Tindakan atau perilaku seperti ini tentu mendapat respons dan kecaman dari seluruh masyarakat karena dianggap tidak memiliki kepekaan dan rasa kemanusiaan serta miskin solidaritas atau dengan kata lain fungsi

sosialnya tidak aktif (disfungsi sosial). Pandemi COVID-19 telah berimbas terhadap munculnya patologi sosial yang terwujud dalam tindakan-tindakan penyimpangan sosial (Mahyuddin, 2020). Ini ditandai dengan banyaknya tindakan kekerasan dimana orang melanggar norma-norma sosial yang ada. Disamping itu, runtuhnya fungsi pengontrol dari lembaga/institusi sosial yang memberikan keleluasaan dalam bertingkah laku tanpa kendali, tanpa kontrol sehingga norma-norma intitusional kehilangan sama sekali efektifitasnya. Hal ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena kerjadinya disorganisasi/disintegrasi sosial bersebab pandemi COVID-19.

Solidaritas di Era New Normal

Penguatan nilai solidaritas dan praktik nyata terhadap sesama menjadi hal yang mendesak untuk tetap hadir. Bahkan, rasa solidaritas harus tetap di kumandangkan terlebih lagi dalam kondisi pandemic virus COVID-19 yang hingga kini belum menunjukkan perubahan yang lebih baik.

Memasuki periode yang kerap disebut dengan istilah 'new normal' (kenormalan yang baru), sejatinya akan menuntut banyak perubahan gaya hidup. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak pada banyak sisi kehidupan yang akhirnya hal demikian sangat mungkin mengikis rasa kemanusiaan yang sebelumnya sangat dijunjung tinggi dalam semua alemen bangsa ini.

Tantangan yang ada dihadapan kali ini jelas bukan sebuah hal yang mudah untuk dilewati, sebab boleh dikata

negara ini sejatinya tidak cukup siap menghadapi ancaman pandemik seperti ini. Selain itu kenyataan bahwa vaksin pengobatan yang langsung mampu menyembuhkan manusia dari COVID-19 belum juga ditemukan hingga hari ini. Pilihan mengubah perilaku hidup masyarakat bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Tingkat kesulitan ada pada habit masyarakat yang telah lama terbina, menjadikan persoalan yang ada semakin terasa berat.

Kemanusiaan masing-masing individu benar-benar mendapat ujian yang serius, akankah keegoisan masih menjadi primadona dalam era new normal ini? Ataukah masing-masing individu mulai berkenan berfikir perihal kepentingan publik?. Dengan kata lain lebih mengutamakan solidaritas dengan sesama ketimbang mengutamakan hal-hal personal. Apalagi kita sebagai bangsa yang dikenal memang memiliki banyak modal sosial (Mahyuddin, 2019). Modal sosial adalah bagian dari alternatif solusi yang bisa digunakan (Wahyu & Kustiningsih, 2020).

Dalam mengupayakan kemunculan praktik solidaritas tersebut, nilai-nilai solidaritas yang menjadi pondasi penting mesti menjadi pemahaman bersama terlebih dahulu. Setidaknya dengan pemahaman awal yang kokoh, menghadirkan peluang lebih besar untuk meyakinkan pentingnya merajut semangat kebersamaan ditengah paceklik akibat pandemi. Salah satu nilai fundamental yang menjiwai pemahaman solidaritas adalah membangun "altruisme". Altruisme sendiri merupakan sebuah konsepsi yang menekankan pada perasaan mendasar

seorang individu yang ingin berbagi terhadap pihak lain untuk kemanfaatan sosial.

Mencoba membaca kondisi yang ada dan agenda pemerintah melalui kenormalan yang baru dari perspektif di atas, menjadikan kita sadar bahwa agenda kenormalan yang baru bukanlah periode dimana persoalan COVID-19 telah berakhir. Namun, bila berbicara mengenai wujud penghargaan terhadap martabat manusia dalam konteks bersolidaritas di era kenormalan baru, rasanya penting untuk mengingatkan kembali hal mendasar namun mendesak untuk dilakukan, yaitu keharusan mematuhi protokol pencegahan dan penanganan COVID-19. Sebab, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah diagendakan pemerintah tersebut, sejatinya masing-masing individu tidak hanya berupaya menjaga kehidupan yang dimilikinya melainkan juga perpanjangan hidup dari individu lainnya.

Masyarakat Indonesia hari ini memang hidup dalam periode kerentanan yang teramat sangat. Sehingga hanya dengan langkah-langkah bersolidaritas-lah, stabilitas bangsa dalam era kenormalan yang baru masih mungkin terjaga. Dalam konteks ini, masyarakat dari berbagai elemen sosial diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada di masyarakat serta mampu mengeratkan rasa toleransi meski berbeda suku, ras, dan agama.

Di tengah ancaman pandemi COVID-19 penting untuk selalu membangun kolaborasi yang baik. Ya, di dalam melawan pandemi ini kita harus berjuang bersama-sama.

Tidak perduli kita berbeda agama, suku dan lain sebagainya, yang paling penting tetap menjaga solidaritas.

Dengan demikian, memasuki periode yang kerap disebut dengan istilah 'new normal' (kenormalan yang baru), sejatinya akan menuntut banyak perubahan gaya hidup. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak ke banyak sisi kehidupan yang akhirnya hal demikian sangat mungkin mengikis rasa kebersamaan yang sebelumnya sangat di junjung tinggi dalam peradaban bangsa ini.

Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat (*community resilience*) mengalami guncangan (*shock*) akibat pandemik COVID-19 (Nurkidam et all, 2020). Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia (seperti, teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa nyaman makanan) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Untuk itu, pilihan solidaritas tanpa batas adalah perilaku hidup masyarakat yang perlu ditumbuh kembangkan tanpa harus saling mengekskusi (Mahyuddin, 2018). Kita tahu bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Namun, jika kita tidak mengupayakan itu, maka ini akan menjadikan persoalan yang ada semakin terasa berat.

Daftar Pustaka

Kusnitingsih, W. & N. (2020). Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi COVID-19. In *Tata Kelola Pengangan COVID-19 di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Mahyuddin, M., Ilham, I., & Rusdi, M. (2020). Horor Coronavirus Deseases dan Konflik Kekerasan Masyarakat: Tinjaun Sosiologis atas Penolakan Jenazah Pasien Covid-19. *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, *3*(1).

Mahyuddin. (2018b). Social exclusion of bpjs participant in implementing program of JKN in Indonesia. In *Post Graduate Forum of Health Systems and Policies, University Kebangsaan Malaysia* (Vol. 1).

Nurkidam, A., Bakri, M., Saleh, M., Mustary, E., Budiono, I. N., Rasyid, A., … Syam, M. T. (2020). *Coronalogy: Varian Analisis & Konstruksi Opini*. IAIN Parepare Nusantara Press.

BIODATA PENULIS

Mahyuddin, lahir di Polewali Mandar Sulawesi Barat 31 Oktober 1991. Penulis menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Makassar tahun 2014. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi yang sama yakni mengambil magister Sosiologi melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kemenkeu RI. Saat ini, penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selain mengabdikan diri di lembaga pendidikan, ia juga terlibat dalam kegiatan riset dan pengabdian dengan mendirikan lembaga West Sulawesi Research and Empowerment Center (WESREC Sulbar) bersama rekan sesama akademisi di Sulawesi Barat. Terkait dengan publikasi ilmiah, terdapat beberapa artikel, jurnal dan buku yang telah dipublikasikan/diterbitkan.

Ilham, lahir di Sidrap pada tanggal 12 Desember 1998.Putera dari pasangan Hasanuddin dan Hasyulianti . merupakan anak Pertama dari empat bersaudara. Memulai pendidikan di bangku Taman Kanak Kanak (TK) Kartini. Topoyo Kab.Mamuju Tenggah. Lanjut di Sekolah Dasar Inpres Bayor No.12 Topoyo Kab. Mamuju Tengah tahun 2006 s.d 2010. Kamudian lanjut Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Topoyo tahun 2010 s.d 2012. Lanjut Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Duapitue Kab. Sidrap tahun 2014 s.d 2016. Pada tahun 2018 terdaftar sebagai

Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuliddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare. Pangalaman organisasi. Pengurus HMPS-SA (Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama) Selaku Sekretaris Umum. Dan Anggota Mahasiswa Islam Sidenreng-Rappang Indonesia (MASSIDDI) Kota Parepare. Bergabung di Komunitas Lingkar Nalar Parepare.

Nugrahayu, lahir di Pekkabata Kec. Duampanua Kab. Pinrang pada tanggal 06 Mei 2000 merupakan putri dari pasangan Latuo Bunru dan Nurjanna Saenong. Anak pertama dari dua bersaudara. Memulai pendidikan pada tahun 2007-2012 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 197 Data. Pada tahun 2013-2015 melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Duampanua . Dan kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pinrang pada Tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) angkatan kedua tahun 2018. Bukan hanya bergelut di bidang akademik, namun ikut bergelut di dunia organisasi. Pada tahun 2018 bergabung di oraganisasi Mahasiswa Daerah Duampanua Pinrang (MADDUPPA) dan menjadi pengurus periode 2019-2020. Pada tahun 2019 Menjadi Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Bumi Harapan Cabang Parepare dan Bergabung di Organisasi Bela Negara Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Merupakan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (DEMA FUAD) periode 2019-2020.

Silmi Qurota Ayun, lahir di Parepare 15 januari 2001, putri dari pasangan Rustam dan Herlina merupakan anak putri pertama dari tiga bersaudara,saat ini silmi sedang menjalankan studinya di Institut Agama Islam Parepare prodi sosiologi agama,sebelum belajar di IAIN parepare silmi bersekolah di SMA BUDI UTOMO Perak Jombang Jawa Timur disamping menjadi siswa SMA Silmi juga terdaftar sebagai santri wati di pondok gading pada tahun 2016-2019,berkat ketertarikan akan kehidupan sosial dan agama,Silmi ditahun 2019 dia diterima sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Parepare program studi sosiologi agama,dan ini merupakan karya buku pertamanya bersama-teman diprodi sosiologi agama.

Nur Aslina, lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Mei 2001. Putri dari pasangan Saparuddin dan Sariah, merupakan putri pertama dari 5 bersaudara. Memulai pendidikan pada Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) Jabatan hal Ehwal Agama Islam Negeri sabah, di Tadika Likas Kota Kinabalu. Lalu kemudian melanjutkan sekolah dasar di SDN 183 Patampanua dan sekolah menengah pertama di MTS DDI Palirang. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang pada tahun 2017 s.d 2019. Hingga pada tahun 2019 terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare pada program studi Sosiologi Agama (*Sosiologi Of Religion*) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD). Ini merupakan buku pertamanya bersama teman prodi sosiologi agama.

A. Jurana Anggriana, lahir di Sokang 20 April 2001. Putri dari pasangan Andi Suardi dan Hajerah dan Jurana merupakan anak tunggal. Saat ini, A. Jurana sedang menjalankan studinya di Institut Agama Islam Negeri Parepare Prodi Sosiologi Agama. Sebelum belajar di IAIN Parepare, Jurana bersekolah di MAN Pinrang. Berkat kegigihan belajar, akhirnya saya diterima di Institut Agama Islam Negeri Parepare Program Studi Sosiologi Agama. Dan ini merupakan buku karya pertamanya bersama teman-teman di Sosiologi Agama.

Fitriani, Lahir di Bawasalo Kabupaten Barru pada tanggal 26 Desember 2000. Puteri dari pasangan Rustang dan Rahmatang. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Memulai Pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri Bawasalo. Lanjut sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Balusu tahun 2013 s.d 2016. Kemudian lanjut sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Barru, Mangkoso, kab. Barru tahun 2017 s.d 2019. Hingga pada tahun 2019 terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare Program Studi Sosiologi Agama (*Sosiology Of Religion*) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD). Dan ini merupakan karya buku pertamanya bersama rekan di prodi sosiologi agama.

Muhammad Rusdi Talib, lahir di Malaysia pada tanggal 04 Februari 1999 merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara serta merupakan putra dari pasangan Mohd Talib dan Hj Muliati. Memulai pendidikan pada tahun 2007- 2012 di sekolah kebangsaan Rancangan Suan Lamba, Kinabatangan, Malaysia. Pada tahun 2013 melakukan perpindahan ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan memasuki sekolah SMP dan tamat pada tahun 2015 di SMP 1 Duampanua, Pinrang. Kemudian melanjutkan pendidikan SMA di sekolah SMA 2 Negeri Pinrang pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah(FUAD) sebagai angkatan ke-2. Selain menjadi mahasiswa yang selalu bergelut dengan dunia akademik, penulis juga mempunyai kebiasaan yaitu sering jalan-jalan dalam alam nusantara Indonesia. Selain itu, penulis juga mempunyai hobi seperti bermain futsal dan berkemah. Penulis juga mempunyai kebiasaan membaca jika ada waktu, karna bagi penulis" buku adalah guru dan dimana kita berada itulah sekolah kita.